

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK
(STUDI KASUS DI PASAR TUAH SERUMPUN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



YULVIRA MAWARNI

NPM : 187110491

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yulvira Mawarni
NPM : 187110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
(Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 26 September 2022


Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Pembimbing


Prof. Dr. H. Sufian Hamim, S.H., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yulvira Mawarni
NPM : 187110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
(Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

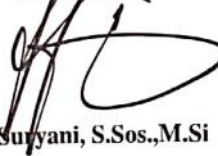
Ketua,



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, S.H., M.Si

Pekanbaru, 26 September 2022

Sekretaris,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Anggota,



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Indra Safri, S.Sos., M.Si



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1093/UIR-FS/KPTS/2022**

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Yulvira Mawami
N P M : 187110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

Struktur Tim :

1. Prof. Dr. H. Sufian H. , M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Lilis Suriyani, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Herman, S.Sos., M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 September 2022 M
24 Safar 1444 H

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



- Tembusan :**
1. Rektor UIR
 2. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1093/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 21 September 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 september jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yulvira Mawami
NPM : 187110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

Nilai Ujian : Angka : *02.44* ; Huruf : *A*
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Sufian H. , M.Si. | Ketua | 1. |
| 2. | Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Sekretaris | 2. |
| 3. | Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.. | Anggota | 3. |
| 4. | Herman, S.Sos., M,Si | Notulen | 4. |

Pekanbaru, 22 September 2022

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos. M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yulvira Mawarni
NPM : 187110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
(Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dari akademik, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 September 2022

Ketua,



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, S.H., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Satri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Prodi Administrasi Publik



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan S1 pada program studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi ALLAH SWT.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)**, tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan selama proses penyusunan skripsi. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dekan Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, S.H., M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku Dosen PA.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, Khususnya pada Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mencari ilmu di Universitas Islam Riau.
8. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam segala urusan Administrasi.
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak beserta Staff yang telah membantu penulis dalam memberikan data atau informasi demi skripsi ini.
10. Kedua Orangtua tercinta yakni Ibunda Asmara Murni dan Ayahanda Masli yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak kandung tercinta Meci Mawar Lasari, S.Pd serta abang ipar Julius dan Adik-adik kandung Okta Regi Mawarsyah, Apriliani Mawar Fadila, Agista Rafi Mawarnda, yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Pandi Hidayat yang telah mendampingi penulis dan Insyaallah Till Jannah yang telah banyak membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
13. Winda Friyanti Ningsih, S.AP, Intania Arver, S.AP, Anisa Ayu Lestari, S.AP, dan Zilfi Purnama Rahmi selaku sahabat saya selama masa perkuliahan yang banyak membantu selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
14. Elsa Rahmasari, Veronica Amelia Putri Defi, Desi Nofriyanni, dan Febrina Sabrini selaku sahabat saya yang banyak memberikan dukungan.
15. Teman-teman seperjuangan saya di Prodi Administrasi Publik yang banyak meluangkan waktu dalam berkembang memahami ilmu-ilmu yang dipelajari sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan kepada semua pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 26 September 2022

Penulis

Yulvira Mawarni

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|--------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI | v |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | xvii |
| ABSTRAK..... | xviii |
| ABSTRACK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN... | 15 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 15 |
| 2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik | 15 |
| 2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik..... | 20 |
| 2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik..... | 26 |
| 2.1.4 Konsep dan Teori Tata Kelola | 32 |
| 2.1.5 Konsep dan Teori Pedagang Kaki Lima | 36 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 42 |
| 2.3 Kerangka Pikiran..... | 46 |
| 2.4 Konsep Operasional | 47 |
| 2.5 Operasional Variabel..... | 48 |
| 2.6 Teknik Pengukuran | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| 3.1 Tipe Penelitian | 52 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 52 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 53 |
| 3.4 Teknik Penarikan Sampel | 53 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 54 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 54 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 55 |

| | |
|--|----|
| 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian | 56 |
| 3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian | 57 |

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 59

| | |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tualang..... | 59 |
| 4.1.1 Sejarah Kecamatan Tualang..... | 59 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 60 |
| 4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 60 |
| 4.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak..... | 61 |
| 4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 65 |
| 4.2.4 Sumber Daya Manusia | 68 |
| 4.3 Gambaran Umum Pasar Buah Serumpun..... | 70 |
| 4.3.1 Sejarah Pasar Buah Serumpun..... | 70 |
| 4.3.2 Deskripsi Pasar Buah Serumpun..... | 70 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73

| | |
|---|-----|
| 5.1 Identitas Responden | 73 |
| 5.1.1 Jenis Kelamin | 73 |
| 5.1.2 Usia | 74 |
| 5.1.3 Pendidikan..... | 75 |
| 5.2 Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 77 |
| 5.2.1 Responden Pedagang Kaki Lima | 78 |
| 5.2.2 Responden Pengunjung..... | 91 |
| 5.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 106 |

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 107

| | |
|----------------------|-----|
| 6.1 Kesimpulan | 107 |
| 6.2 Saran..... | 108 |

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN..... 112

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | : Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak | 4 |
| Tabel 1.2 | : Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Tempat Jualan | 5 |
| Tabel 1.3 | : Rencana Program dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 11 |
| Tabel 1.4 | : Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 12 |
| Tabel 2.1 | : Jurnal Penelitian Terdahulu | 42 |
| Tabel 2.2 | : Operasional Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 48 |
| Tabel 3.1 | : Populasi dan Sampel | 53 |
| Tabel 3.2 | : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 56 |
| Tabel 4.1 | : Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Pangkat dan Golongan | 68 |
| Tabel 4.2 | : Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 69 |
| Tabel 4.3 | : Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin | 69 |
| Tabel 4.4 | : Jumlah Tempat Dasar di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak | 71 |
| Tabel 4.5 | : Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Dagangannya | 71 |
| Tabel 5.1 | : Identitas Responden Pedagang Kaki lima Penelitian Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin. | 73 |
| Tabel 5.2 | : Identitas Responden Pedagang Kaki lima Penelitian Tata Kelola Pengunjung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin. | 74 |
| Tabel 5.3 | : Identitas Responden Pedagang Kaki lima Penelitian Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Usia | 74 |
| Tabel 5.4 | : Identitas Responden Pengunjung Penelitian Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Usia | 75 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.5 | : Identitas Responden Pedagang Kaki lima Penelitian Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Pendidikan | 76 |
| Tabel 5.6 | : Identitas Responden Pengunjung Penelitian Tata Kelola Pedagang Kaki lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Pendidikan | 76 |
| Tabel 5.7 | : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki lima tentang Indikator Merencanakan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 78 |
| Tabel 5.8 | : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki lima tentang Indikator Melaksanakan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 82 |
| Tabel 5.9 | : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki lima tentang Indikator Mengarahkan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 85 |
| Tabel 5.10 | : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki lima tentang Indikator Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 88 |
| Tabel 5.11 | : Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung tentang Indikator Merencanakan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 91 |
| Tabel 5.12 | : Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung tentang Indikator Melaksanakan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 93 |
| Tabel 5.13 | : Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung tentang Indikator Mengarahkan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 95 |
| Tabel 5.14 | : Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung tentang Indikator Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak..... | 97 |
| Tabel 5.15 | : Rekapitan Hasil Tanggapan Semua Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 99 |
| Tabel 5.16 | : Rekapitan Hasil Tanggapan Semua Responden Pengunjung Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak..... | 102 |

Tabel 5.17 : Rekapitulasi Hasil Tanggapan Semua Responden Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak..... | 8 |
| Gambar 2.1 : Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 46 |
| Gambar 4.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 67 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| 1. Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 112 |
| 2. Kuesioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 116 |
| 3. Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 121 |
| 4. Data Telly Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 123 |
| 5. Data Telly Tanggapan Responden Pengunjung Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) | 128 |
| 6. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak..... | 133 |
| 7. Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 134 |
| 8. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau | 135 |
| 9. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak..... | 136 |
| 10. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau | 137 |
| 11. Surat Keterangan Jurnal Online | 138 |
| 12. Surat Keterangan Lulus Plagiasi | 139 |
| 13. Sertifikat Lulus Tes Baca Al-Qur'an | 140 |

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulvira Mawarni
NPM : 187110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan Ujian Konferensif yang saya telah ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 September 2022
Yang membuat Pernyataan



Yulvira Mawarni

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK
(STUDI KASUS DI PASAR TUAH SERUMPUN)**

Oleh : Yulvira Mawarni

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun). Indikator Penilaian Merencanakan, Melaksanakan, Mengarahkan, dan Pengawasan. Metode yang digunakan *Kuantitatif* dan *Kualitatif* saling melengkapi. Adapun populasi dan sampel penelitian ini yaitu berjumlah 174 orang. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak pada Pasar Buah Serumpun berada pada kategori penilaian Cukup Baik. Faktor Penghambatnya ruang jalan yang sempit membuat pedagang kaki lima sulit untuk berjualan tidak hanya pedagang kaki lima, pengunjung juga sulit untuk berbelanja dan berdesakan, tidak ada yang ingin menjadi ketua organisasi membuat pedagang kaki lima diarahkan satu persatu dan banyak sampah yang berserakan membuat pedagang kaki lima yang berjualan maupun pengunjung yang berbelanja merasa kurang nyaman. Sebaiknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak meningkatkan sarana dan prasarana di pasar buah serumpun, dan lebih memperhatikan pedagang kaki lima

Kata Kunci : Tata Kelola, Pedagang Kaki Lima

**IMPLEMENTATION OF STREET VENDORS GOVERNANCE BY THE
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY OF SIAK DISTRICT (CASE
STUDY IN TUAH SERUMPUN MARKET)**

By Yulvira Mawarni

ABSTRACK

This study aims to determine and analyze the Implementation of Street Vendor Governance by the Department of Trade and Industry of Siak Regency (Case Study in Tuah Serumpun Market). Assessment Indicators Planning, Implementing, Directing, and Monitoring. Quantitative and qualitative methods are complementary. The population and sample of this study amounted to 174 people. Data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation and questionnaires. The results showed that the Implementation of Street Vendor Governance by the Department of Trade and Industry of Siak Regency at the Tuah Serumpun Market was in the category of Good Enough assessment. The inhibiting factor is the narrow road space makes it difficult for street vendors to sell not only street vendors, visitors are also difficult to shop and jostle, no one wants to be the head of the organization making street vendors directed one by one and a lot of garbage scattered makes street vendors those who sell and visitors who shop feel less comfortable. It is better if the Trade and Industry Office of Siak Regency improves the facilities and infrastructure in the allied Tuah market, and pays more attention to street vendors.

Keywords : Governance, Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar demokrasi dan tuntunan reformasi birokrasi adalah menciptakan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Jika ditinjau dari aspek organisasi dan tatalaksana, reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran dimana terdapat sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif dan efisien serta memenuhi *good governance* sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai harapan akan kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik sebagai salah satu tuntunan reformasi telah menjadi awal timbulnya kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur sipil negara diarahkan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan guna menghadapi tantangan globalisasi. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Tata kelola meliputi semua mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana penduduk dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memnuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsesus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan manusia.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan,

dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Pasar merupakan tempat dimana kegiatan jual dan beli terjadi yang mana pasar merupakan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan. Pasar juga tempat pedagang untuk mencari nafkah dan peningkatan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pasar Tuah Serumpun merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang yang memiliki bangunan kios dan los yang cukup banyak. Pedagang yang berjualan di Pasar Tuah Serumpun sering dianggap menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya ketertiban dipasar tersebut dikarenakan sebagian besar pedagang tidak mengindahkan ketertiban sesuai peraturan yang ada. Pasar Tuah Serumpun adalah pasar yang selalu ramai dikunjungi karena letaknya strategis, harga yang murah dan ditengah kota membuat

tingginya minat konsumen berbelanja di Pasar Buah Serumpun membuat jumlah pedagang kaki lima semakin banyak. Tidak adanya pedagang yang menempati kios dan los membuat pedagang kaki lima berjualan di badan jalan. Namun pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

| Nama Pasar | Tahun | Jumlah Pedagang Kaki Lima |
|---------------|-------|---------------------------|
| Tuah Serumpun | 2019 | 125 |
| | 2020 | 163 |
| | 2021 | 253 |

Sumber : Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa Pasar Buah Serumpun dalam 3 tahun terakhir jumlah pedagang kaki lima yang ada mengalami peningkatan di tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 pedagang kaki lima berjumlah 125, tahun 2020 pedagang kaki lima berjumlah 163, dan meningkat pada tahun 2021 jumlah pedagang kaki lima sebanyak 253.

Fenomena yang dapat dirangkup pada observasi pra survey di Pasar Buah Serumpun sebagai berikut :

1. Banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran, sebagian masyarakat beralih ke sektor formal yaitu Pedagang kaki lima sehingga bertambahnya jumlah pedagang kaki lima dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.2 : Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Tempat Jualan

| No. | Tahun | Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar | | | | Jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan |
|-----|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Kios | | Los | | |
| | | Ditempati Pedagang Kaki Lima | Tidak ditempati Pedagang Kaki Lima | Ditempati Pedagang Kaki Lima | Tidak ditempati Pedagang Kaki Lima | |
| 1. | 2021 | 120 | 35 | 23 | 17 | 110 |

Sumber : Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dijelaskan bahwa di Pasar Buah Serumpun terdapat kios yang tidak ditempati pedagang sebanyak 35, sedangkan los yang tidak ditempati pedagang sebanyak 17, dan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan sebanyak 110.

2. Peningkatan sarana dan prasarana yang masih kurang, hal ini terlihat adanya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan.
3. Kurangnya pengarahan yang diberikan, hal terlihat dari masih terdapat kios dan los tidak ditempati pedagang kaki lima.

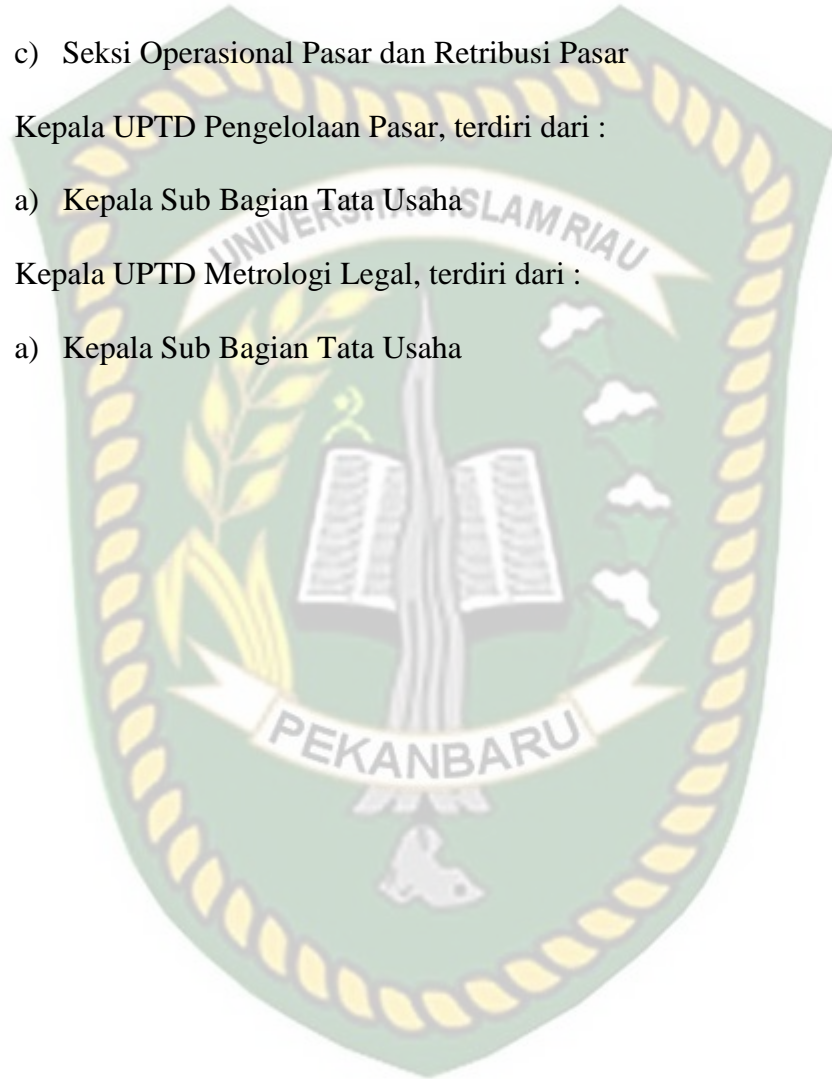
Untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak berkepentingan untuk menertibkan dan membina pedagang kaki lima di pasar yang mana tujuannya untuk memperindah kota dan mensejahterakan para pedagang kaki lima. Untuk bekerja menjadi pedagang kaki lima tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bahkan melebihi sektor formal. Pedagang kaki lima atau yang disebut PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor formal yang

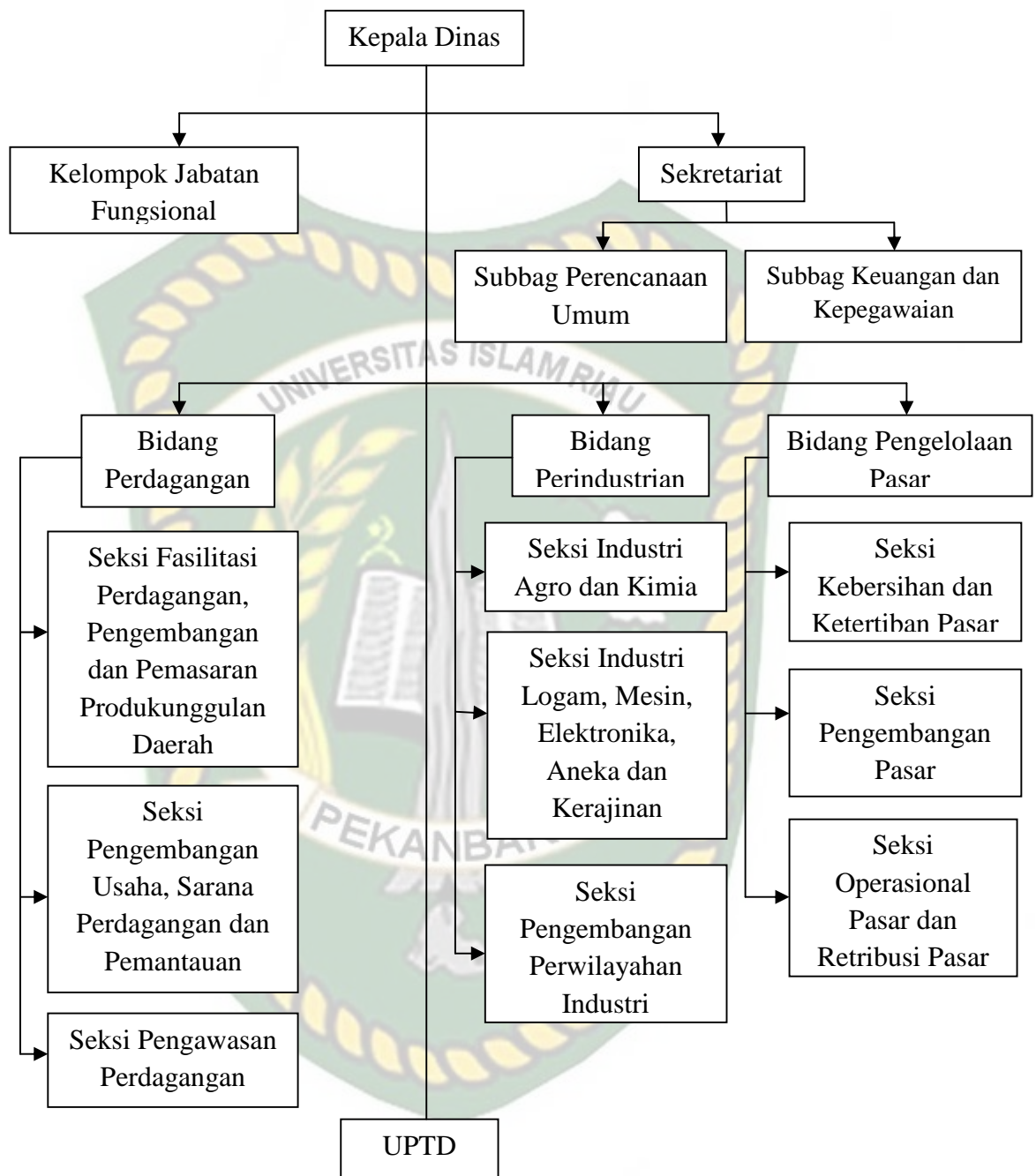
termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya menggunakan gerobak atau lainnya yang mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Permasalahan pengelolaan pedagang kaki lima tentu tidak terlepas dari keterkaitan oknum-oknum yang bertanggung jawab diantaranya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a) Subbag Perencanaan dan Umum;
 - b) Subbag Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitasi Perdagangan Pengembangan dan Pemasaran Produkunggulan Daerah;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi;
 - c) Seksi Pengawasan Perdagangan
4. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika;
 - c) Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri

5. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
 - b) Seksi Pengembangan Pasar;
 - c) Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar
6. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Kepala UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha





Gambar 1.1 :
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Pasar.
2. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengelolaan Pasar.
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengelolan Pasar; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpin baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun Rencana Strategis untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak guna memberikan pelayanan yang prima kepada pelaku usaha khususnya dan masyarakat umumnya serta dapat meningkatkan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak maupun instansi terkait. Dan penyusunan Renstra ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin tercapainya penguasaan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis, bekeadilan dan berkelanjutan.
- b. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik inter dan antar SKPD, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan di Kabupaten Siak

- c. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Program dan kegiatan Urusan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan :
 - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
 - Pendapatan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan (UTTP).
 - Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian.
 - Kegiatan evaluasi dan monitoring.
 - Penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI.
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri :
 - Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.
 - Pelayanan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
 - Monitoring perkembangan Ekspor.
 - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan (*up dating* data pasar).
3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan :
 - Kegiatan penyuluhan peningkatan pelayanan yang berbudaya dan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.
 - Penataan tempat tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.
 - Pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan.

Program dan kegiatan Urusan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terdapat Rencana Program dan Indikator Kinerja dalam Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan sebagai berikut :

Tabel 1.3 :
Rencana Program dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan |
|--|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| | | Target | Target | Target | Target | Target | |
| Peningkatan Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Output : Terciptanya kenyamanan bagi konsumen serta tertibnya Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pemeliharaan Pasar Siak | Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin pasar | 2 kec. | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 kec. |
| Pengadaan fasilitas pendukung pasar siak | Output : Terciptanya pasar yang representatif | 1 kec. | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 kec. |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa Peningkatan penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan dari tahun 2017-2021 memiliki target

0%, Pemeliharaan Pasar Siak tahun 2017 memiliki target 2 kec. Dan Pengadaan fasilitas pendukung pasar siak tahun 2017 memiliki target 1 kec.

Dari pengamatan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program pembinaan pedagang kaki lima terdapat Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, yaitu :

Tabel 1.4 :
Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak

| Program dan Kegiatan | Target Kinerja Program | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | |
| Peningkatan Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Pasar Siak | 191.325.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.325.750 |
| Pengadaan fasilitas pendukung pasar siak | 136.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.250.000 |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa Peningkatan penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan dari tahun 2017-2021 tidak ada pendanaan indikatif, Pemeliharaan Pasar Siak tahun 2017 memiliki pendanaan

sebesar Rp.191.323.750. Dan Pengadaan fasilitas pendukung pasar siak tahun 2017 memiliki pendanaan sebesar Rp.136.250.000.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun).

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun).

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai kegunaan penelitian adalah :

- a. Secara Teoritis sebagai salah satu pengembangan ilmu administrasi publik.
- b. Secara akademik sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Secara empiris sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tata kelola pedagang kaki lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan.

Sepanjang pengetahuan kita, manusia selalu disibukkan dengan administrasi, apapun bentuk dan tingkatannya, dimanapun manusia tinggal bersama, hidup bersama, bekerjasama dan berusaha untuk menciptakan sesuatu (Siagian, 1986).

Di Indonesia administrasi merupakan proses kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sering didefinisikan dalam arti “sempit”. Oleh karena itu, akan dijelaskan administrasi dalam arti “sempit” dan “luas” sebagai berikut.

Administrasi dalam arti sempit sering dimaknai sebagai kegiatan tulis-menulis, catat mencatat, mengetik, surat menyurat, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Beddy Iriawan Maksudi (2017:28) disimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang pemahaman :

- a. Dari aspek proses, bahwa proses administrasi merupakan keseluruhan urutan pelaksanaan yang didesain, yaitu dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengoordinasian, penggerakan atau kepemimpinan, pengawasan, dan evaluasi serta sampai pada proses pencapaian tujuan.
- b. Dari aspek fungsi, bahwa fungsi administrasi adalah keseluruhan kegiatan (aktivitas) yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok dan mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok yang berada di dalam organisasi.
- c. Dari aspek pranata (lembaga), bahwa aspek kepranataan adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan secara resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia berkelompok dalam suatu kelompok dan dinamakan pranata atau lembaga.

Sondang P. Siagian 2004:2 (dalam Berry Iriawan Maksudi, 2017:28) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Willoughby dalam Dimock dan Dimock (1986:22) berpendapat bahwa administrasi publik adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya

seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah.

Menurut The Liang Gie (dalam Indra dan Sufian, 2013:10), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hendry dan Tarmizi (2015:12), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Leonard D.White (dalam andriansyah, 2015:6) dalam bukunya *Introduction to The Study of Public Administration*, beliau mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua kelompok negara (swasta, sipil, atau militer, usaha besar maupun usaha kecil).

Administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur-unsur administrasi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang manusia atau lebih, seseorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri karena itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerjasama itu.
- b. Tujuan, tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses administrasi itu. Tujuan tersebut dapat ditentukan oleh sebagian atau oleh seorang dari mereka yang terlibat.

- c. Tugas dan pelaksanaannya, akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain.
- d. Peralatan dan perlengkapan, yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai faktor.

Ilmu administrasi sebagai cabang disiplin ilmu pengetahuan saat ini cukup membawa pengaruh besar terhadap pola kehidupan sehari-hari senantiasa tumbuh berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan sifat inilah membawa tujuan-tujuan yang telah ditentukan menemukan cara yang lebih efisien dan efektif. Menurut Dewi (2011:20) sifat ilmu administrasi yaitu :

- a. Netral, dalam arti ilmu administrasi tidak mengandung nilai yang baik maupun yang buruk, sehingga dapat diterapkan untuk menyikapi permasalahan yang bertujuan baik atau buruk.
- b. Fleksibel, dalam arti ilmu administrasi berkaitan dengan individu yang dinamis, sehingga tidak mencantumkan dalil yang eksak/pasti seperti ilmu matematika atau ilmu alam.

Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. Salah satu cabang ilmu administrasi adalah ilmu administrasi publik, menurut Sondang P. Siagian (dalam Wirman Syafri, 2012:25) administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Menurut Leonard D White (dalam Wirman Syafri, 2012:23) administrasi publik terdiri dari semua kegiatan yang bermaksud melaksanakan kebijakan umum atau kebijakan negara.

Menurut Wirman Syafri (2012:24) administrasi publik menurut pengertian ilmu politik, mempunyai dua arti. Dalam arti luas administrasi publik berarti pekerjaan-pekerjaan yang terliput di dalam (yang dilakukan dalam rangka) penanganan yang aktual terhadap masalah-masalah pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit administrasi publik berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi saja, yakni kegiatan kepala eksekutif (kepala negara) dan para jabatan pembantunya yang disebut administrator.

Menurut Beddy Iriawan Maksudi (2017:223) dapat dipahami pertama, bahwa administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (seperti modal, sarana dan prasarana, teknologi) diorganisir (organisasi) dikelola (fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, administrasi publik suatu seni dan ilmu. Suatu seni (art), administrasi publik merupakan keterampilan dalam praktik yang ditujukan untuk mengatur hubungan-hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan administrasi publik merupakan disiplin ilmu (science) yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Menurut George J. Gordon (dalam Syaifiie, 2010:48) administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun

perseorangan yang berkaitan dengan peneraan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi publik adalah keseluruhan proses kerjasama kelompok dalam melaksanakan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik

Organisasi sebagai sistem terbuka, menurut Hicks dan Gullet 1987:347 (dalam Indra dan Sufian 2016:26) secara umum terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan. Proses organisasi yang demikian, dijelaskan Kast dan Rosenzweig (1985:112) bahwa *the organization receives inputs from the society in the form of people, materials, money, and information, it transforms these into outputs of products, service, and rewards to the organizational members participation.*

Dengan demikian organisasi sebagai sistem terbuka, mencakup organisasi itu sendiri dan juga hubungan-hubungannya dengan kelompok-kelompok di luar. Organisasi harus berfungsi dua arah secara serentak. Pertama, organisasi harus menemukan cara-cara untuk melestarikan diri, untuk memancing dukungan, energi, dan kerjasama dari anggota-anggotanya. Kedua, organisasi harus berusaha melindungi diri dari tekanan-tekanan yang terdapat dalam lingkungannya, menghimpun sumber-sumber daya, dan dukungan dari pihak-pihak lain.

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu sama lain, dimana administrasi membutuhkan wadah atau tempat untuk bekerja sama dalam

mencapai tujuan yang ingin dicapai, tempat atau wadah inilah yang disebut organisasi.

Sumber daya organisasi dikenal dengan *tools of management* terdiri dari “6M” yaitu :

- a. Man (manusia)
- b. Money (modal atau dana)
- c. Material (perlengkapan)
- d. Machine (produksi atau mesin)
- e. Method (peraturan)
- f. Market (pendapatan masyarakat)

Organisasi sebagai proses pembagian tugas adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama perlu memiliki sistem pembagian tugas. Adanya kerjasama yang baik tidak menjamin keberhasilan pencapaian tujuan. Setiap jenis pekerjaan, yang paling sederhana pun, sepanjang pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, mutlak memerlukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing (Wursanto, 2003:50).

Wursanto (2003:53) mengatakan unsur-unsur organisasi secara sederhana mempunyai tiga unsur, yaitu : ada orang-orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Agar orang-orang yang ada dalam organisasi dapat melakukan kerjasama dalam usaha

mencapai tujuan bersama maka diperlukan daya kerja. Daya kerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : daya manusia dan bukan daya manusia.

1. Daya manusia

Daya manusia terdiri dari kemauan dan kemampuan, meliputi : kemauan dan kemampuan untuk bekerja, untuk berbuat, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi.

2. Daya bukan manusia

Daya bukan manusia yaitu : daya yang diperoleh dari sumber materi, barang, benda, misalnya mesin-mesin, uang, waktu, metode, dan dari sumber kekayaan alam lainnya (iklim, udara, cuaca, air, dan sebagainya).

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang-orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Didalam suatu organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab wewenang yang ada didalamnya yang mana agar kerja orang-orang didalamnya terlaksana dengan jelas.

Banyak pemikiran dari para ahli yang membahas tentang organisasi.

Menurut Indra dan Sufian (2013:2) organisasi adalah :

- a. Sekumpulan orang-orang yaitu orang-orang yang merasa dirinya lemah, mempunyai keterbatasan-keterbatasan kemampuan akan tetapi berkehendak untuk memenuhi kebutuhannya yang dicita-citakan oleh masing-masing pribadinya.

- b. Orang-orang ini berkumpul untuk mengisi kekurangan masing-masing, saling mempengaruhi, hingga keterbatasan-keterbatasan dapat mereka atasi serta lebih memudahkan pemenuhan kebutuhannya, karena itu setiap orang jelas tugas dan wewenangnya.
- c. Karena mereka hidup berkelompok-kelompok maka masing-masing harus memikirkan kebutuhan seluruh anggota kelompok dan tidak hanya terpaku pada kebutuhan pribadi saja.
- d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kelompok itulah masing-masing harus tunduk pada kepentingan bersama, ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama dan interaksinya.

Menurut Dwight Waldo (dalam Indra dan Sufian, 2013:15) organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarka atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Siagian 1981:7 (dalam Hendry dan Tarmizi, 2015:16) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terikat, dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan tersebut terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Menurut G.R Terry (dalam Sufian, 2003:27) organisasi berasal dari kata “*organism*” yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan

keseluruhan hubungan mereka. Jadi semua organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.

Siagian 1981 : 7 (dalam Hendry dan Tarmizi, 2015:16) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terikat, dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan tersebut terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Pada hakikatnya, pengertian organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sebagai organisasi di pandang sebagai “wadah”. Dan kedua organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kemudian, ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyorot kearah interaksi antara orang-orang didalam organisasi tersebut.

Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Sedangkan menurut Michela Giudici (2019) menyatakan organisasi publik merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditentukan dalam ikatan yang terdapat, seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Ciri-ciri organisasi publik menurut Robbins (2010:12) adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
- b. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
- c. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
- d. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada.
- e. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
- f. Organisasi lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
- g. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
- h. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
- i. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik.
- j. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi publik adalah tempat atau wadah yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik

Pengetahuan manajemen telah berkembang bukan hanya sebagai seni tetapi telah menjadi disiplin ilmu. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Hunger dan Wheelen 1996:9 (dalam Indra dan Sufian 2016:43) mengemukakan proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar :

1. Pengamatan Lingkungan
2. Perumusan Strategi
3. Implementasi Strategi
4. Evaluasi dan Pengawasan

Menurut G.R. Terry (dalam Indra dan Sufian, 2013:4) manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Sufian (2003:30) manajemen adalah :

- a. Manajemen sebagai suatu sistem adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan yang diorganisasi.
- b. Manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang ada.
- c. Manajemen sebagai suatu fungsi adalah mempunyai kegiatan tertentu yang dapat dilakukan sendiri tanpa menunggu selesainya kegiatan yang lain,

sekali pun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

- d. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bersifat interdisipliner dengan menggunakan bantuan ilmu sosial, filsafat dan matematika.
- e. Manajemen sebagai kegiatan yang terpisah artinya mempunyai kegiatan tersendiri, jelas terpisah dari kegiatan teknik lainnya.
- f. Manajemen sebagai suatu kumpulan orang, dipakai di dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi.
- g. Manajemen sebagai suatu profesi artinya mempunyai bidang pekerjaan atau bidang keahlian tertentu.

Menurut Siagian 1981:5 (dalam Hendry dan Tarmizi 2015:14) manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil, dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi. Karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Dengan perkataan lain, administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan-kegiatan yang dapat dibedakan.

Menurut Beddy Iriawan Maksudi (2017:83) fungsi manajemen yaitu :

- a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan pemimpin atau manajer setelah selesai membuat perencanaan.

c. *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah mengarahkan orang-orang agar mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan kerja keras untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

Menurut Echols dan Shadily (dalam Badrudin, 2013:1) Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.

Menurut Hasibuan (dalam Badrudin, 2013:3) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen diartikan adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi.

Manajemen sebagai ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan (*approach*) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusiawi (Siswanto, 2011:7).

Menurut Hikmat (dalam Badrudin, 2013:3) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen adalah sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Terry dalam Badrudin, 2013:3).

Definisi manajemen mengalami perkembangan dari masa ke masa tergantung kebutuhan organisasi, sehingga istilah manajemen yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam, para ahli memandang manajemen dari sudut yang berbeda yaitu beberapa para ahli memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, ahli lain memandang manajemen sebagai proses.

Terry dan Leslie (dalam Badrudin, 2013:6) mengemukakan lima pendekatan untuk memahami manajemen yaitu :

1. Pendekatan operasional.
2. Pendekatan perilaku manusia
3. Pendekatan sistem sosial sebagai sistem interaksi budaya.

4. Pendekatan sistem-sistem.
5. Pendekatan kuantitatif.

Menurut Badrudin (2013:6) Asas atau prinsip merupakan pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran atau tindakan. Manajemen yang efektif harus memiliki asas sebagai dasar menjalankan organisasi karna asas tersebut dipakai oleh semua sumber daya dalam organisasi.

Menurut Fayol (dalam Badrudin, 2013:6) mengemukakan tiga belas asas manajemen yaitu :

1. Pembagian kerja
2. Wewenang dan tanggung jawab.
3. Disiplin.
4. Kesatuan pemerintah.
5. Kesatuan arah.
6. Kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
7. Pembagian gaji yang wajar.
8. Pemusatan wewenang.
9. Hierarki atau rantai berkala.
10. Keteraturan.
11. Keadilan.
12. Inisiatif.
13. Kesatuan.

Prinsip-prinsip manajemen menurut Badrudin (2013:9) yaitu :

1. Prinsip manajemen berdasarkan sasaran

Merupakan teknik manajemen untuk mendorong partisipasi dan komunikasi bawahan, membantu memperjelas, menjabarkan, dan mengkomunikasikan tujuan, serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Prinsip manajemen berdasarkan orang.

Merupakan suatu konsep manajemen modern yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku dan komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan organisasi.

3. Prinsip manajemen berdasarkan informasi.

Semua kegiatan manajemen pasti memerlukan informasi. Informasi yang dibutuhkan manajer disediakan oleh sistem informasi manajemen (*management information system*) yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur.

Menurut Nor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontroln terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Shafritz dan Rusel (dalam Keban, 2008:93) manajemen publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu proses organisasi, dan pemanfaata sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pengertian tentang manajemen publik diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pada sektor publik.

2.1.4 Konsep dan Teori Tata Kelola

Menurut Anderson, (2004:78) Tata kelola atau pengelolaan adalah sebuah kata yang besar, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.

Menurut Sufian Hamim (2016) Prinsip tata kelola organisasi yang baik terdiri dari : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.

Menurut Hasibuan (2008:88) Pengelolaan merupakan tugas-tugas seorang manajer. Pengelolaan adalah suatu uruan pekerjaan (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi.

Menurut Said Achmad Kabiru Rafie (2017:17) adapun indikator dari Pengelolaan atau tata kelola antara lain

1. Merencanakan
2. Melaksanakan
3. Mengarahkan
4. Pengawasan

Khairandy dalam Apriyana, H. (2008). Tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu *good governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. *Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. (Cadbury,1992 yang dikutip Media Akuntansi dalam Zeyn, E. (2011)

Good governance merupakan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo dalam Azlim dan Bakar (2012).

Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka, Krina (2003).

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan

diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara (Neumayer dalam Fathia (2018)). Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain.

Disisi lain istilah Good governance menurut Payana dalam Fathia (2018). merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terdapat makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governance (Panaya dalam Fathia 2018) lainnya adalah sebagai berikut: "Good Governance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik".

Mardiasmo Sari, E.N. (2014) menyatakan bahwa terdapat 3 mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif dan transparan serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance yaitu :

1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat
2. Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian
3. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling

berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Warsono dalam Purwani, T. (2010) menyebutkan ada 4 prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu :

1. Fairness (Keadilan). Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparency (Transparansi). Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholders. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. Accountability (Pertanggung Jawaban). Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin

penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

4. Responsiveness (Tanggapan) Prinsip Responsif dalam pelaksanaan good governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika individual dan social. Kualitas etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik social menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola atau pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

2.1.5 Konsep dan Teori Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang membutuhkan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima menurut (An-nat dalam Rahmadani (2017).

Sedangkan Karafir dalam M.Tahir (2016) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah seseorang yang berjualan di tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, dekat-dekat toko dan pasar-pasar tanpa adanya izin usaha dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang

kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa izin atau adanya izin dari pemerintah.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL , yaitu istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak . istilah itu sering diartikan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima . Lima kaki tersebut yaitu dua kaki pedagang ditambah tiga “ kaki “ gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki) .saat ini sebutan PKL juga digunakan untuk pedagang dijalankan pada umumnya (Budiman, B. (2010).

Menurut haryono dalam Pulungan, M. S. (2016:15). Pedagang kaki lima (PKL) yaitu orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Manning dan Effendi dalam Yunus (2011) menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu:

1. Penjual Borongan

Penjual borongan untuk perihal yang mempunyai cadangan penguasaan modal lebih besar dalam hubungan perekonomian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir sendiri distribusi barang barang dagangannya.

2. Pengecer Besar

Pengecer besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pedagang besar yang termasuk pengusaha warung di tepi jalan atau pojok depan sebuah

halaman rumah, dan pedagang pasar yaitu mereka yang memiliki hak atas tempat yang tetap dalam jaringan pasar resmi.

3. Pengecer Kecil

Pengecer kecil termasuk katergoi pedagang kecil sektor informal mencakup pedagang pasar yang berjualan dipasar, ditepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios dipinggiran pasar yang besar.

Secara garis besar karakteristik PKL (Ismawan dalam M.Tahir 2016:194), digambarkan sebagai berikut :

1. Informalitas. Sebagian besar PKL bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada, bahwa keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas. Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi tidak adanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan kesempatan ke arah negatif pelakunya akan berkurang.
3. Kemandirian. Biasanya para pedagang mencari modal sendiri tanpa memperoleh bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal dengan berbagai kebijakan dan prinsip keberhati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tidak adanya jaminan yang dimiliki mereka.

4. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, akan tetapi peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima dikemukakan oleh suyanto dalam Anggriani, (2016).

1. Pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik.
2. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
3. Sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
4. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal
5. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

Masalah yang muncul melalui kehadiran PKL bagi perkotaan (Soegijoko dalam M.Tahir 2016:195).

1. Mengganggu kegiatan perkotaan sehingga menimbulkan kemacetan.
2. Tidak tertatanya dengan baik dikarenakan tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.
3. Sulit diperkirakan pertumbuhannya sehingga sulit untuk ditata.

Dewanto (2004 dalam M.Tahir 2016) dalam skripsinya menyebutkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL, yaitu :

1. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan tertentu akibat tidak tertata.
2. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat.
3. Menimbulkan kesan kumuh.
4. Terganggunya lahan parkir karena digunakan sebagai lahan usaha oleh PKL.
5. Penggunaan bahu jalan sesuai fungsi peruntukannya.
6. Kehadiran PKL mengakibatkan sampah yang tidak sedikit setiap harinya.

Ardhiansyah (2003 dalam M.Tahir 2016:196) menerangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :

1. Faktor Keramaian Lokasi.
2. Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.
3. Kenyamanan dan keamanan.
4. Lokasi dagang PKL yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari preman.

Sastrawan,(2015). Menerangkan ada beberapa faktor pendorong masyarakat untuk memilih berusaha pada pedagang kaki lima yaitu :

1. Persaingan persaingan yang tidakimbang terhadap usaha kecil yang dilakukan ekonomi lemah.

2. Pola kegiatan ekonomi perkotaan yang cenderung menciptakan Keterbatasan sumber daya (harta benda, keterampilan, permodalan, dan informasi).
3. Terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak pekerja formal terpaksa berpindah ke sektor informal.
4. Kesempatan kerja pada sektor informal terutama pedagang kaki lima terbuka lebar, karena penawaran/permintaan.

Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 (Bab 1 pasal I) Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Dari beberapa pengertian tentang Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah pedagang yang menawarkan barang atau menjual jasa di tempat-tempat umum, seperti trotoar, lahan parkir, dan bahu jalan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti/Judul | Hasil Penelitian |
|----|--|--|
| 1. | <p>Dinarjati Eka Puspitasari (2010)</p> <p>“Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman”</p> <p>Mimbar Hukum, Vol. 22 No.3, Oktober 2010</p> | <p>Untuk mewujudkan fungsi tata ruang di kota DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai kualifikasi pola penataan pedagang kaki lima sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan pedagang kaki lima dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Adapun pola penataan PKL di kota Yogyakarta yaitu Relokasi, Penataan di lokasi semula, dan Pemunduran dari lokasi semula. Sedangkan di Kabupaten Sleman penataan dibagi 2, yaitu Relokasi dan Penataan di lokasi semula.</p> |
| 2. | <p>Lalu Mulyadi (2010)</p> <p>“Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang”</p> <p>No.15, Vol.VIII, Januari 2010</p> | <p>Pedagang kaki lima di kota Malang dalam pengelolannya ditangani oleh beberapa dinas dan kantor pemerintahan. Untuk pembinaan dan pendataan pedagang kaki lima kota Malang berada dibawah kantor Bina pedagang kaki lima. Pembinaan yang dilakukan oleh kantor Bina pedagang kaki lima dilakukan melalui koordinator-koordinator pedagang kaki lima yang terdapat pada tiap-tiap sentra pedagang kaki lima.</p> |
| 3. | <p>Muhammad Yunus dan Auliya Insani (2017)</p> <p>“Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang ‘Epe di Pantai Losari”</p> <p>Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1, Juni 2017</p> | <p>Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan serta instansi terkait lainnya secara fungsional memiliki tugas pembinaan yang berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah berkenan dengan pembinaan pedagang kaki lima termasuk pedagang pisang epe. Implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima dalam hal ini pedagang pisang epe yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan pemberian penyuluhan dan pembimbingan, penataan tempat dan waktu berusaha serta kebijakan</p> |

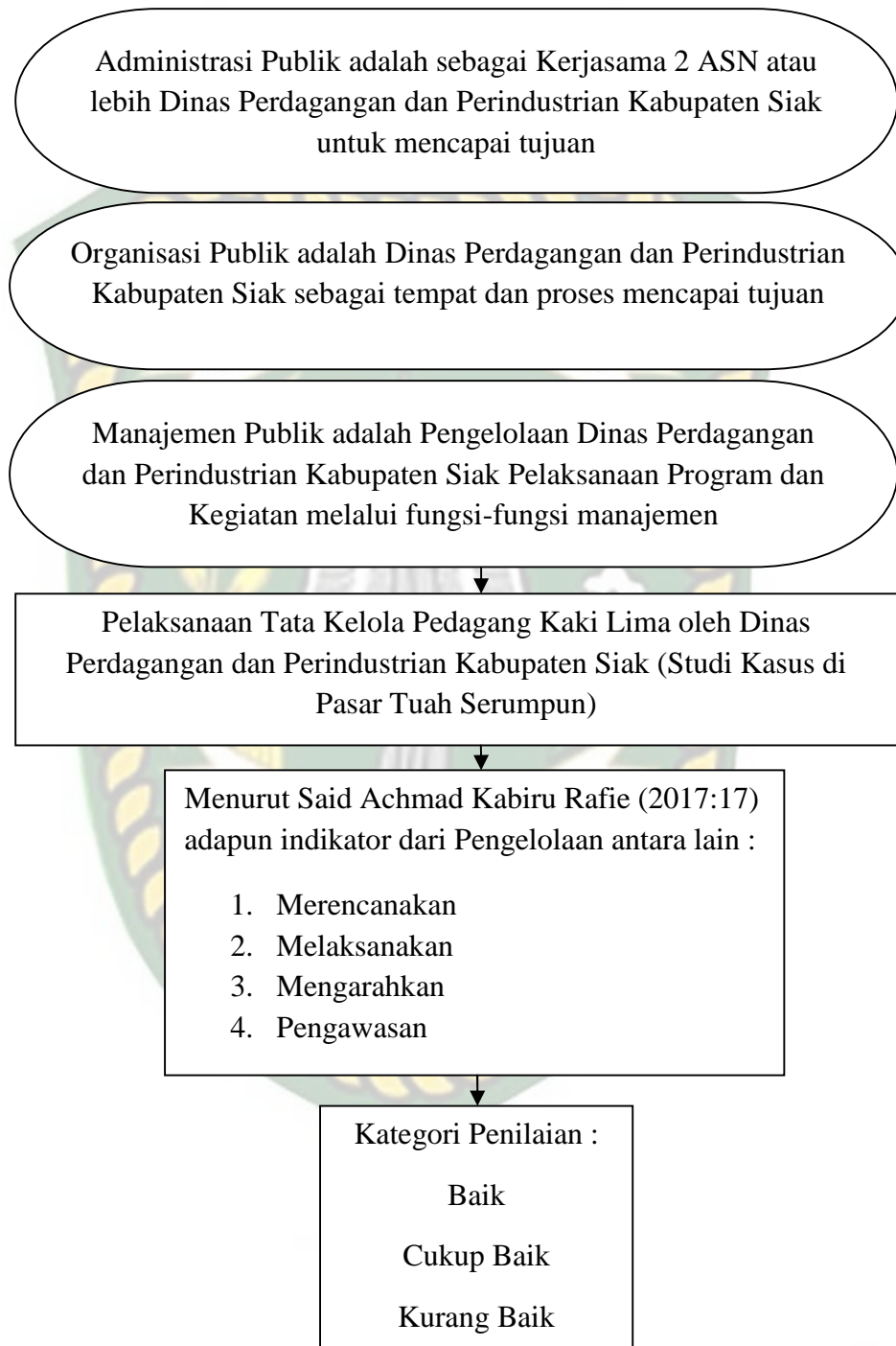
| | | |
|----|--|--|
| | | penataan perizinan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima di wilayah Kota Makassar. |
| 4. | Tona Lubis, Erwita, Andi, dan Raja (2014) “Model Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi” Jurnal Dinamika Manajemen Vol.2 No.2 April-Juni 2014 | Model tata kelola pedagang kaki lima di Jambi hanya dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan, pemasaran dan SDM sementara operasionalnya tidak berpengaruh, hal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan teliti lebih lanjut karena ketidaktepatan pedagang kaki lima dalam mengelola operasionalnya juga akan berimbas pada lingkungan sekitarnya sehingga pada akhirnya tetap akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya. |
| 5. | Erwita dan Raja Sarah Patricia (2014) “Dampak Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kinerja Usaha (Studi pada PKL Wilayah Sekitar Kampus di Kota Jambi). Jurnal Dinamika Manajemen, Vol. 2, No.1, Januari-Maret 2014 | Kinerja usaha pedagang kaki lima wilayah sekitar kampus di Kota Jambi dipengaruhi oleh pengelolaan SDM yang direfleksikan oleh tenaga kerja dan pengelolaan operasional yang direfleksikan oleh aliran kerja. Arah pengaruh variabel pengelolaan SDM negatif berarti jika pedagang kaki lima ingin meningkatkan kinerjanya maka tenaga kerja yang mereka gunakan sebaiknya berasal dari luar keluarga. Sedangkan variabel pengelolaan operasional berupa aliran kerja harus mampu ditingkatkan oleh pedagang kaki lima agar kinerjanya juga meningkat. |
| 6. | Dian Azhari (2017) “Penataan Pedagang Kaki Lima pada Pasar Atas dan Bawah Kota Bukittinggi” JOM FISIP, Vol.4, No.1, Februari 2017 | Penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi, dapat dilihat dari 4 kriteria manajemen menurut George R.Terry, yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan maka dapat dilihat bahwa penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dikarenakan masih ditemuinya para pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi terlarang di Kota Bukittinggi. |

| | | |
|----|---|--|
| 7. | <p>Hasanuddin (2019)</p> <p>“Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang”</p> <p>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM), Vol.15, No.1, Mei 2019</p> | <p>Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum berjalan sesuai harapan, sebab adanya oknum yang “bersahabat” dengan pedagang kaki lima sehingga operasi-operasi penertiban terkadang tidak menemukan adanya pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban, sebab sebelumnya telah diberitahu oleh oknum tersebut akan adanya operasi penertiban. Selain itu, pedagang kaki lima mendapat jaminan keamanan dari pihak lain yang menguasai lokasi-lokasi tertentu di Pasar Tanah Abang, sehingga pedagang kaki lima bebas berdagang. Temuan lain adalah konsep penataan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang masih berupa pengusuran dan penertiban, sehingga tidak menyelesaikan persoalan secara substantif</p> |
| 8. | <p>Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi</p> <p>“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)”</p> <p>Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.5</p> | <p>Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada <i>Batu Tourism Center</i> di Kota Baru merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC dihadapan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah gagal dan merupakan <i>unsuccessful implmentation</i>. Hal ini disebabkan karena banyak bermunculan pedagang kaki lima baru di sekitar alun-alun sehingga BTC semakin sepi pengunjung. Selain itu Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan ini.</p> |
| 9. | <p>Kristian Budi T. (2016)</p> <p>“Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang”</p> <p>Vol.10, No.2, Desember 2016</p> | <p>Strategi penataan yang dapat dilakukan adalah dengan pembenahan secara internal yang meliputi penataan fisik aktivitas kaki lima. Penataan fisik yang dimaksud adalah dengan menetapkan jenis, ukuran, dan bentuk sarana usaha kaki lima sehingga terciptanya keharmonisan dengan unsur arsitektur lokal setempat.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | <p>Hari Indrawan, Achmad Hidir, dan Harapan Tua R.F.S (2020)</p> <p>“Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima”</p> <p>Jurnal Administrasi Negara, Vol.15, No.4, Januari 2010</p> | <p>Dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan Program penataan dengan melakukan pembangunan pasar tradisional yang berguna untuk menampung pedagang kaki lima. Kemudian dalam hal program pembinaan pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pedagang kaki lima. Pada saat ini ada tiga pasar yang dibangun untuk menampung atau mengurai pedagang kaki lima tersebut, yaitu Pasar Lima Puluh, Pasar Palapa dan Pasar Higienis.</p> |
|-----|---|--|

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2022

2.3 Kerangka Pikiran



Gambar 2.1 :
Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2022

2.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah proses penganalisaan data serta untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membuat konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi Publik adalah sebagai Kerjasama 2 ASN atau lebih Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak untuk mencapai tujuan.
2. Organisasi Publik adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sebagai tempat dan proses mencapai tujuan.
3. Manajemen Publik adalah Pengelolaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui fungsi-fungsi manajemen
4. Tata kelola atau pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menawarkan barang atau menjual jasa di tempat umum, seperti trotoar, lahan parkir, dan bahu jalan.
6. Merencanakan adalah sebagai proses penetapan tujuan dan keputusan pengolahan pedagang kaki lima.
7. Melaksanakan adalah kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengorganisasikan dan menggerakkan program dan kegiatan pengolahan pedagang kaki lima.

8. Mengarahkan adalah fungsi kepemimpinan, komunikasi dan koordinasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dalam pengelolaan pedagang kaki lima.
9. Pengawasan adalah kegiatan Dinas memastikan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima sesuai rencana kerja.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Tuah Serumpun)

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penilaian | Kategori Penilaian |
|---|--------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Fungsi Manajemen atau Pengelolaan terdiri dari Merencanakan, Melaksanakan, Mengarahkan, dan Pengawasan Said Achmad Kabiru Rafie (2017:17) | Tata Kelola Pedagang Kaki Lima | Merencanakan | 1. Menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana 2. Membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima | Baik Cukup Baik Kurang Baik |
| | | Melaksanakan | 1. Menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar 2. Mengatur tata letak pedagang kaki lima | Baik Cukup Baik Kurang Baik |
| | | Mengarahkan | 1. Melakukan koordinasi dengan pengurus pasar 2. Mengendalikan situasi pasar | Baik Cukup Baik Kurang Baik |
| | | Pengawasan | 1. Mengawasi pedagang kaki lima 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima | Baik Cukup Baik Kurang Baik |

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2022

2.6 Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan 3 kategori yaitu : Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

Ukuran Variabel

- a. Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak 67-100%.
- b. Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak 34-66%.
- c. Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak 1-33%.

Ukuran Indikator

1. Merencanakan

- a. Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator merencanakan yang telah ditetapkan berada 67-100%.
- b. Cukup Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator merencanakan yang telah ditetapkan berada 34-66%.
- c. Kurang Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator merencanakan yang telah ditetapkan berada 1-33%.

2. Melaksanakan

- a. Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator melaksanakan yang telah ditetapkan berada 67-100%.
- b. Cukup Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator melaksanakan yang telah ditetapkan berada 34-66%.
- c. Kurang Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator melaksanakan yang telah ditetapkan berada 1-33%.

3. Mengarahkan

- a. Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator mengarahkan yang telah ditetapkan berada 67-100%.
- b. Cukup Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator mengarahkan yang telah ditetapkan berada 34-66%.
- c. Kurang Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator mengarahkan yang telah ditetapkan berada 1-33%.

4. Pengawasan

- a. Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator pengawasan yang telah ditetapkan berada 67-100%.
- b. Cukup Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator pengawasan yang telah ditetapkan berada 34-66%.
- c. Kurang Baik : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator pengawasan yang telah ditetapkan berada 1-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan Kualitatif dan Kuantitatif saling melengkapi. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara, gambar dan hasil pengamatan berupa catatan peristiwa dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, dimana informasi diperoleh dari informan dan dari peneliti itu sendiri. Sedangkan Metode Kuantitatif dilakukan penyebaran angket atau kuensioner terhadap responden yang kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel yang sesuai dengan sifat dan jenis data kemudian diberi skor dan persentase.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak. Karena Lokasi Pasar Buah Serumpun berada di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak. Kecamatan Tualang ini merupakan daerah yang belum tertata dengan baik, hal ini disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kecamatan Tualang melakukan langkah konkrit yaitu dengan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dan sampel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

| No | Unit Populasi | Populasi | Sampel | Persentase |
|---------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Kepala Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun | 253 | 72 | 28% |
| 4 | Pengunjung Pasar Buah Serumpun | ~ | 100 | - |
| Jumlah | | ~ | 174 | - |

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2022

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus dan random sampel. Dengan demikian, peneliti mengambil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Kepala Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau menggunakan teknik sensus. Sedangkan Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun dan Pengunjung Pasar Buah Serumpun menggunakan teknik *purposive sampling*.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan agar nantinya dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung secara lisan terhadap pihak yang berkaitan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan dilapangan untuk menambah kejelasan penelitian.

4. Kuesioner

Kuesioner yaitu menyebarkan angket berupa daftar pertanyaan dengan jawaban tertutup dalam hal ini menggunakan skala likert, dan pertanyaan jawaban terbuka.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi. Data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil wawancara, gambar dan hasil pengamatan berupa catatan peristiwa dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, dimana informasi diperoleh dari informan dan dari peneliti itu sendiri. Sedangkan Data Kuantitatif dilakukan penyebaran angket atau kuesioner terhadap responden yang kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel yang sesuai dengan sifat dan jenis data kemudian diberi skor dan persentase.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)

| NO | JENIS KEGIATAN | Bulan dan Minggu ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Penyusunan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rekomendasi Kuisisioner | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi Survey | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survey Lapangan | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 9 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 10 | Ujian Konfrehensif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 11 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 12 | Penggandaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2022

3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika usulan penelitian ini dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB, mempunyai kaitan antara satu sama dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini berisi landasan teoritis untuk melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut menggunakan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan penelitian terdahulu, kerangka pikir, konsep operasional, operasional variabel dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai

lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini terdiri atas identitas responden. Pada hasil pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun).

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tualang

4.1.1 Sejarah Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang terletak antara $0^{\circ}32'$ - $0^{\circ}51'$ LU dan $101^{\circ}28'$ - $101^{\circ}52'$ BT dengan luas wilayah $\pm 373,75$ km². Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut :

- 1) Utara : Kecamatan Minas
- 2) Timur : Kecamatan Koto Gasib
- 3) Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan
- 4) Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru

Tualang yang menurut asal katanya adalah “Tuah” dan “Alang” merupakan bagian dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang ini terletak di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berlokasi berjarak 60 km dari Kota Pekanbaru. Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan yaitu : Kecamatan Siak, Kerinci Kanan, Tualang, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Koto Gasib, Mandau, Pusako, dan Lubuk Dalam.

Kecamatan Tualang berada pada daerah daratan dan sedikit berbukit, dengan mayoritas sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit dan industri. Keadaan alam Kecamatan Tualang secara garis besar adalah hutan yang telah dijadikan lahan perkebunan yang berdominasi oleh tanaman sawit, dapat dilihat dari sudut perbatasan Kecamatan Tualang dengan Kecamatan lainnya yang

sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta di Kecamatan Tualang dan pekebunan masyarakat.

4.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dengan meleburnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dengan Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

a. Visi Kabupaten Siak

“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera Dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu”

b. Misi Kabupaten Siak

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah penerapan E-Government.
2. Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif.

4. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya melayu.

Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dalam perannya mendukung pencapaian Visi Kabupaten Siak, mengambil bagian Misi ke 4 (empat) yaitu : *“Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya”*.

4.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, dan

mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Umum

Mempunyai tugas menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Perencanaan dan Umum, melakukan kegiatan surat menyurat, melaksanakan kearsipan dan ekspedisi.

b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, mengendalikan rencana tahunan, menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

3. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi Fasilitasi Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Perdagangan, Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan.

b. Seksi Pengembangan Usaha Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi

Mempunyai tugas menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, mengolah dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan.

c. Seksi Pengawasan Perdagangan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Perdagangan.

4. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

a. Seksi Industri Agro dan Kimia

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia.

b. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika, Aneka dan Kerajinan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika, Aneka dan Kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Logam, Mesin Elektronika, Aneka dan Kerajinan.

c. Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan Koordinasi dan supervisi potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

a. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Kebersihan dan Ketertiban Pasar.

b. Seksi Pengembangan Pasar

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Pasar.

c. Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Operasional.

6. Unit Pelaksana Teknis

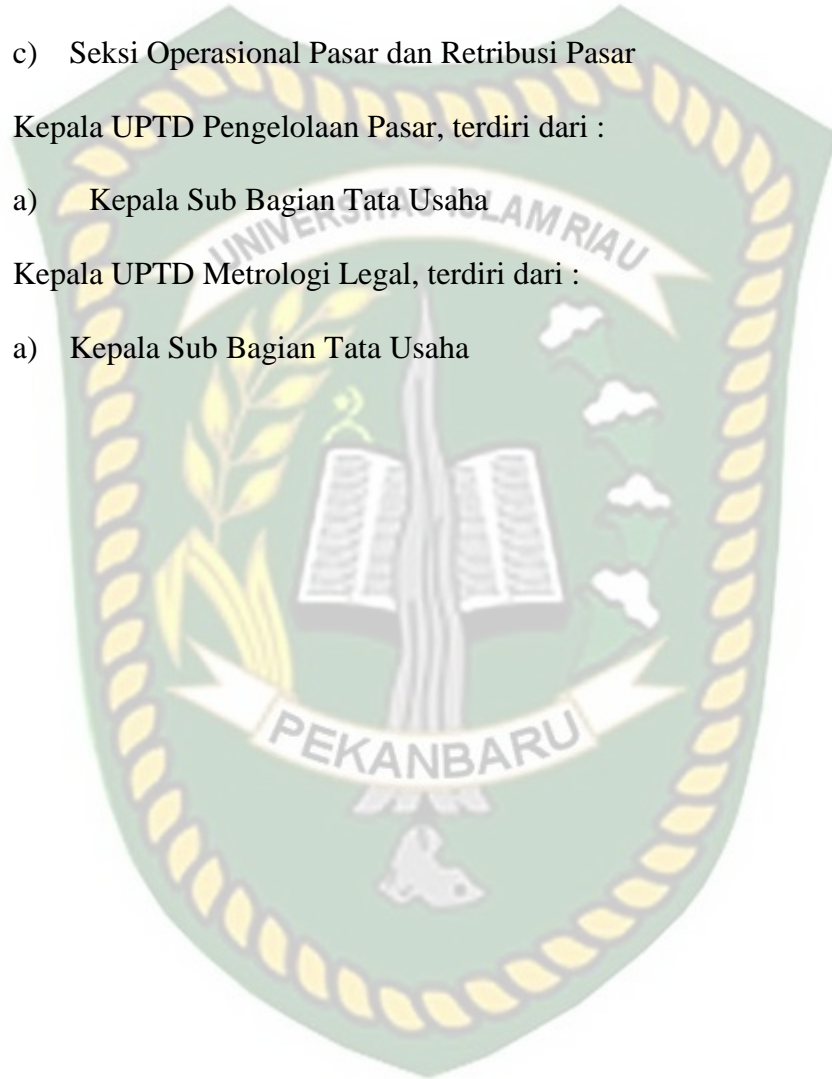
Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya dan pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a) Subbag Perencanaan dan Umum;
 - b) Subbag Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitasi Perdagangan Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi;
 - c) Seksi Pengawasan Perdagangan
4. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika;
 - c) Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri

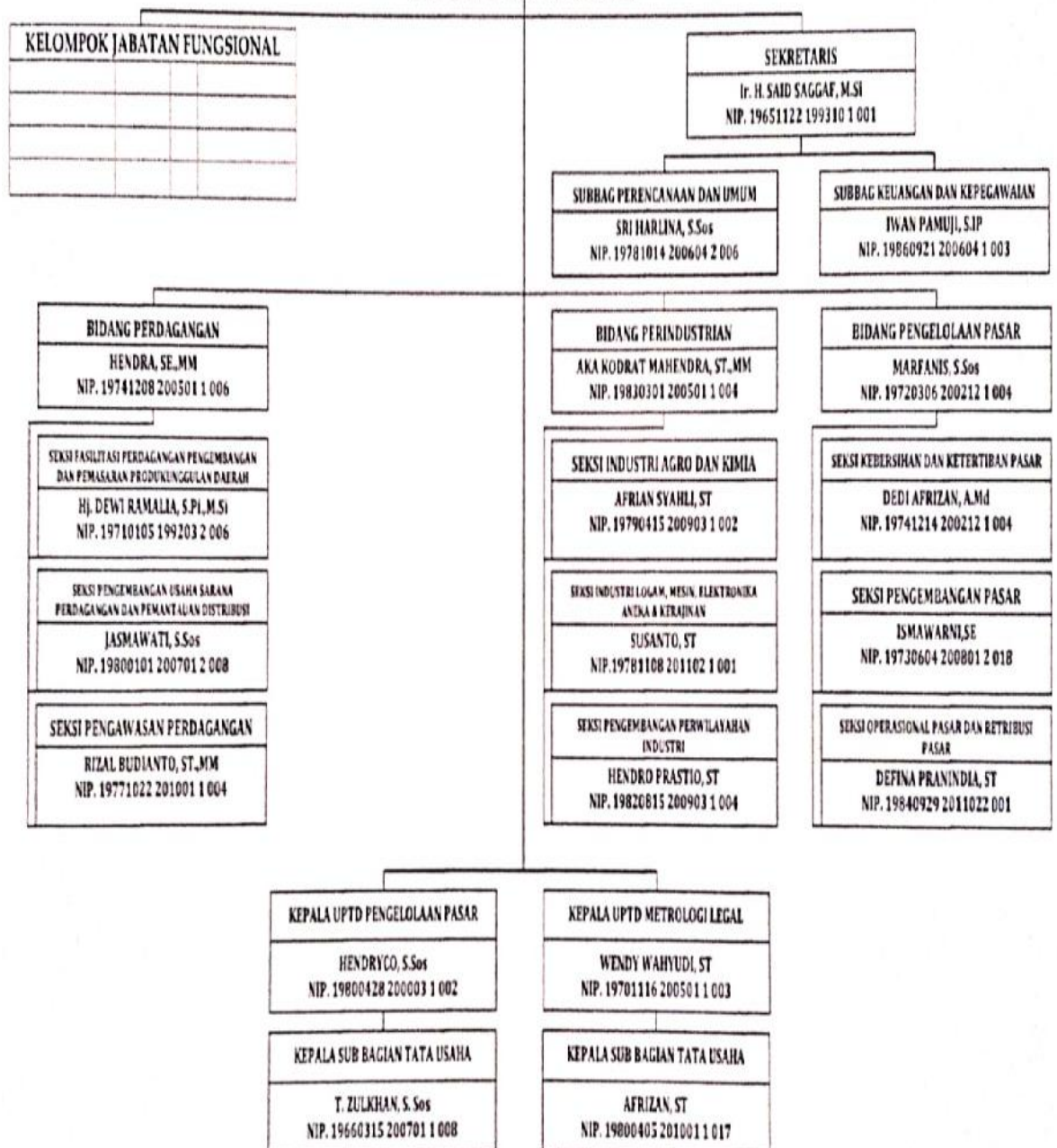
5. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
 - b) Seksi Pengembangan Pasar;
 - c) Seksi Operasional Pasar dan Retribusi Pasar
6. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Kepala UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS
H. WAN IBRAHIM SURJI, ST., MT
NIP. 19641111 198603 1 011

PERATURAN DAERAH KAB. SIAK
NOMOR : 08 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2016



Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

4.2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, profesional dan handal.

- a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 4.1 :
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 |
| 2. | Pembina TK I | IV/b | 2 |
| 3. | Pembina | IV/a | 5 |
| 4. | Penata TK I | III/d | 14 |
| 5. | Penata | III/c | 5 |
| 6. | Penata Muda TK I | III/b | 6 |
| 7. | Penata Muda | III/a | 4 |
| 8. | Pengatur TK I | II/d | 3 |
| 9. | Pengatur | II/c | 1 |
| 10. | Pengatur Muda | II/a | 6 |
| 11. | Juru TK I | I/d | 1 |
| Jumlah Pegawai | | | 48 Orang |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

Dari data pada tabel 4.1 diketahui bahwa pangkat dan golongan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, didominasi oleh pangkat Penata TK I Golongan III/d yang berjumlah 14 orang atau 29.16%.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2 :
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|---|-----------------|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 7 Orang |
| 2 | Sarjana (S1) | 26 Orang |
| 3 | Akademi (D.II, D.III dan Atau setingkatnya) | 1 Orang |
| 4 | SLTA dan Atau setingkatnya | 9 Orang |
| 5 | SMP sederajat | 3 Orang |
| 6 | SD sederajat | 2 Orang |
| | Jumlah | 48 Orang |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

Dari data pada tabel 4.2 diketahui bahwa pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata (S1) yang berjumlah 26 orang atau 54,16%.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 :
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | Laki – Laki | 40 Orang |
| 2. | Perempuan | 8 Orang |
| | Jumlah | 48 Orang |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2022

Data pada tabel 4.3 menggambarkan bahwa pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak didominasi jenis kelamin laki-laki yang mencapai 40 orang atau 83,33%.

4.3 Gambaran Umum Pasar Buah Serumpun

4.3.1 Sejarah Pasar Buah Serumpun

Pasar Buah Serumpun merupakan pasar yang diberi nama oleh Pemuka masyarakat pada tahun 1988 yang didirikan oleh masyarakat dengan dana swadaya. Pasar Buah Serumpun merupakan salah satu pasar yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kondisi Pasar Buah Serumpun yang semakin padat oleh pedagang akibat adanya peningkatan penduduk yang berada di sektor perdagangan, yang mengakibatkan pasar tidak mampu menampung pedagang.

Tahun 2002 pasar ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak sampai tahun 2011. Pada Januari 2012 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. Kemudian didaftarkan pada Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Siak, maka dibentuklah UPTD Pasar Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Siak, dan mengirim unit Koordinator Wilayah (Korwil) disetiap kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tualang untuk mengelola Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang dan Pasar lainnya yang ada di Kecamatan Tualang.

4.3.2 Deskripsi Pasar Buah Serumpun

Pasar Buah Serumpun terletak di Jalan Pipa Km. 04 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Di pasar ini terdapat jumlah tempat dasaran, jumlah pedagang serta sarana dan prasarana yang terdapat di dalamnya. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Tempat Dasaran

Tempat dasaran yaitu tempat didalam bangunan pasar berwujud kios dan los yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang atau jasa termasuk sarananya yang digunakan pedagang kaki lima.

Tabel 4.4 :
Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

| No | Tempat Dasaran | Luas | Tersedia | Ditempati | Tidak Ditempati |
|---------------|----------------|-------|------------|------------|-----------------|
| 1 | Kios | 4 4 m | 155 | 120 | 35 |
| 2 | Los | 2 2 m | 40 | 23 | 17 |
| Jumlah | | | 195 | 143 | 52 |

Sumber : Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di Pasar Tuah Serumpun sejumlah 195 unit yang terdiri dari kios 155 unit dan los 40 unit. Namun dari jumlah tersebut yang ditempati secara keseluruhan sejumlah 145 unit yang terdiri dari 120 unit kios dan 23 unit los.

b. Jumlah Pedagang

Tabel 4.5 :
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Dagangannya

| No | Jenis Dagangan | Jumlah Pedagang Kaki Lima | Persentase (%) |
|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Sayuran dan Buah | 60 | 23.70 |
| 2 | Ikan, Ayam dan Daging | 40 | 15.80 |
| 3 | Makanan dan Minuman | 20 | 7.90 |
| 4 | Bahan-bahan Pokok | 80 | 31.60 |
| 5 | Aksesoris | 7 | 2.80 |
| 6 | Pakaian | 30 | 11.90 |
| 7 | Peralatan Rumah Tangga | 16 | 6.30 |
| Jumlah | | 253 | 100 |

Sumber : Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima yang terdapat di Pasar Buah Serumpun sejumlah 253 pedagang, yang mana sebagian besar pedagang berjualan bahan-bahan pokok sebesar 31.60%, sayuran dan buah sebesar 23.70%, ikan, ayam dan daging sebesar 15.80%, pakaian sebesar 11.90%, makanan dan minuman sebesar 7.90%, peralatan rumah tangga sebesar 6.30%, dan aksesoris sebesar 2.80%.

c. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Buah Serumpun antara lain sebagai berikut :

1. Fasilitas daya tampung listrik
2. Fasilitas tempat penampungan sampah
3. Area parkir
4. Masjid

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Penelitian ini melibatkan beberapa responden yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun karakteristik dari responden diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

5.1.1 Jenis Kelamin

Pada identitas responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Tabel 5.1 :
Identitas Responden Pedagang Kaki Lima Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1. | Laki-Laki | 39 Orang | 54% |
| 2. | Perempuan | 33 Orang | 46% |
| TOTAL | | 72 Orang | 100% |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan jenis kelamin sebanyak laki-laki berjumlah 39 orang dengan persentase 54% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 33 orang dengan persentase 46%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

Tabel 5.2 :
**Identitas Responden Pengunjung Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola
 Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 1. | Laki-Laki | 44 Orang | 44% |
| 2. | Perempuan | 56 Orang | 54% |
| TOTAL | | 100 Orang | 100% |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pengunjung berdasarkan jenis kelamin sebanyak laki-laki berjumlah 44 orang dengan persentase 44% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 56 orang dengan persentase 54%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan.

5.1.2 Usia

Pada identitas responden berdasarkan usia dalam penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak bahwa usia responden bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 :
**Identitas Responden Pedagang Kaki Lima Penelitian Pelaksanaan
 Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan
 Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Usia**

| No | Tingkat Usia | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1. | 21-30 tahun | 23 Orang | 32% |
| 2. | 31-40 tahun | 27 Orang | 38% |
| 3. | 41-50 tahun | 22 Orang | 30% |
| 4. | >50 tahun | - | - |
| Jumlah | | 72 Orang | 100% |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan usia sebanyak 21-30 tahun berjumlah 23 orang dengan persentase 32%, 31-40 tahun berjumlah 27 orang dengan persentase 38%, dan 41-50 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 30%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan usia didominasi 31-40 tahun.

Tabel 5.4 :
Identitas Responden Pengunjung Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Usia

| No | Tingkat Usia | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 1. | 21-30 tahun | 14 Orang | 14% |
| 2. | 31-40 tahun | 39 Orang | 39% |
| 3. | 41-50 tahun | 19 Orang | 19% |
| 4. | >50 tahun | - | - |
| Jumlah | | 100 Orang | 100% |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pengunjung berdasarkan usia sebanyak 21-30 tahun berjumlah 14 orang dengan persentase 14%, 31-40 tahun berjumlah 39 orang dengan persentase 39%, dan 41-50 tahun berjumlah 19 orang dengan persentase 19%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pengunjung berdasarkan usia didominasi 31-40.

5.1.3 Pendidikan

Pada identitas responden berdasarkan Pendidikan dalam penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak pendidikan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 5.5 :
Identitas Responden Pedagang Kaki Lima Penelitian Pelaksanaan
Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Siak Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S2/S3) | - | - |
| 2. | Perguruan Tinggi (S1/D3) | 7 Orang | 10% |
| 3. | SMA/Sederajat | 49 Orang | 68% |
| 4. | SMP/Sederajat | 16 Orang | 22% |
| 5. | SD/Sederajat | - | - |
| TOTAL | | 72 Orang | 100% |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan pendidikan sebanyak Perguruan Tinggi (S1/D3) berjumlah 7 orang dengan persentase 10%, SMA/Sederajat berjumlah 49 orang dengan persentase 68%, dan SMP/Sederajat berjumlah 16 orang dengan persentase 22%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pedagang kaki lima berdasarkan pendidikan didominasi SMA/Sederajat.

Tabel 5.6 :
Identitas Responden Pengunjung Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola
Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S2/S3) | - | - |
| 2. | Perguruan Tinggi (S1/D3) | 19 Orang | 19% |
| 3. | SMA/Sederajat | 35 Orang | 35% |
| 4. | SMP/Sederajat | 18 Orang | 18% |
| 5. | SD/Sederajat | - | - |
| TOTAL | | 100 Orang | 100% |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pengunjung berdasarkan pendidikan sebanyak Perguruan Tinggi (S1/D3) berjumlah 19 orang dengan

persentase 19%, SMA/Sederajat berjumlah 35 orang dengan persentase 35%, dan SMP/Sederajat berjumlah 18 orang dengan persentase 18%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pengunjung berdasarkan pendidikan didominasi SMA/Sederajat.

5.2 Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian para pedagang kaki lima, oleh karena itu pengelolaan harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima di perlukan adanya peran atau kerjasama antara pihak atau pemerintah dan juga masyarakat.

Pedagang kaki lima tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit, modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi mengandung berbagai persoalan dilematis misalnya dalam melakukan kegiatan usahanya, pedagang kaki lima memanfaatkan ruang dan waktu semaksimal mungkin.

Wilayah Kabupaten Siak merupakan suatu daerah yang merupakan daerah yang saat ini sedang berkembang. Perkembangan tersebut tidak lepas dengan adanya pelaku usaha mikro atau pedagang kaki lima yang membuat pendapatan daerah yang baik dan dapat memajukan sektor ekonomi daerah.

Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan juga pengawasan merupakan hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan pedagang kaki lima

dalam penelitian ini. Untuk melihat jawaban dari responden tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Responden Pedagang Kaki Lima

1. Merencanakan

Merencanakan adalah sebagai proses penetapan tujuan dan keputusan pengelolaan pedagang kaki lima. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 72 orang terhadap indikator merencanakan yang terdapat dua item penilaian yaitu menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima.

Tabel 5.7 :
Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Tentang Indikator Merencanakan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana | 48 (67%) | 14 (19%) | 10 (14%) | 72 (100%) |
| 2. | Membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima | 45 (62%) | 20 (28%) | 7 (10%) | 72 (100%) |
| Jumlah | | 93 | 34 | 17 | 144 |
| Rata-rata | | 46.5 | 17 | 8.5 | 72 |
| Persentase | | 64% | 24% | 12% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pedagang kaki lima paling tinggi berada di persentase 64% dengan kriteria Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala pengukuran 67-100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari merencanakan adalah 64% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana adalah 67%. Hal ini dikarenakan rencana dari segi fasilitas seperti kios dan los, tempat parkir, tempat penampungan sampah, daya tampung listrik, dan mesjid sudah tersedia. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 19% dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 14%. Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat pedagang kaki lima kesulitan dalam berjualan. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana sudah cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian kedua yang menjawab baik pada membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima adalah 62%. Hal ini dikarenakan rencana pembinaan yaitu melakukan sosialisasi. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 28% dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 10%. Hal ini dikarenakan masih

belum terlihat sosialisasi yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rencana pembinaan pedagang kaki lima belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Ibu Ismawarni. Mengenai indikator Merencanakan dengan pertanyaan bagaimana bentuk rencana yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun? (Wawancara : Kamis, 1 Agustus 2022, Pukul 10:51 WIB). Beliau menjawab :

“Untuk rencana dalam pengelolaan pedagang kaki lima, kami selaku dinas menyediakan sarana dan prasarana untuk pedagang kaki lima berjualan. Di Kabupaten Siak ini banyak Pasar yang tersebar di Kecamatan. Setiap kecamatan pasti ada UPTD. Nah untuk pasar buah serumpun ini UPTD nya bernama Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau atau yang di singkat Korwil Pasar wilayah III. Kami telah berkoordinasi dengan mereka untuk mengelola pedagang kaki lima di pasar buah serumpun”.

Kepala Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, Ibu Linda. (Wawancara : Jum'at, 2 Agustus 2022, Pukul 10:30 WIB). Menambahkan :

“Bentuk rencana yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima, kami selaku Korwil Pasar Wilayah III menyediakan rencana untuk sarana dan prasarana agar lebih baik lagi dan layak digunakan tidak hanya untuk pedagang kaki lima berjualan tetapi juga untuk kenyamanan pengunjung saat berbelanja”.

Diketahui dari hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar

Kecamatan Tualang dan Sei Mandau bentuk rencana dalam pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Merencanakan berada pada kategori penilaian “**Cukup Baik**” dengan persentase 64% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat pedagang kaki lima kesulitan dalam berjualan dan masih belum terlihat sosialisasi yang dilakukan.

2. Melaksanakan

Melaksanakan adalah kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengorganisasikan dan menggerakkan program dan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 72 orang terhadap indikator melaksanakan yang terdapat dua item penilaian yaitu menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar dan mengatur tata letak pedagang kaki lima.

Tabel 5.8 :
Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Tentang Indikator Melaksanakan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar | 46 (64%) | 16 (22%) | 10 (14%) | 72 (100%) |
| 2. | Mengatur tata letak pedagang kaki lima | 33 (46%) | 27 (37%) | 12 (17%) | 72 (100%) |
| Jumlah | | 79 | 43 | 22 | 144 |
| Rata-rata | | 39.5 | 21.5 | 11 | 72 |
| Persentase | | 55% | 30% | 15% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 33-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : *Olahan Kuesioner Penelitian, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pedagang kaki lima paling tinggi berada di persentase 55% dengan kriteria Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala pengukuran 67-100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari melaksanakan adalah 55% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar adalah 64%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima membentuk ketua organisasi berdasarkan jenis barang dagangan. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 22% dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 14%. Hal

ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar belum efektif.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian kedua yang menjawab baik pada mengatur tata letak pedagang kaki lima adalah 46%. Hal ini dikarenakan menata pedagang kaki lima sesuai dengan jenis dagangannya. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 37%. dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 17%. Hal ini dikarenakan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya. Hal tersebut menunjukkan melaksanakan penertiban pedagang kaki lima belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Ibu Ismawarni. Mengenai indikator Melaksanakan dengan pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun? (Wawancara : Kamis, 1 Agustus 2022, Pukul 10:51 WIB). Beliau menjawab :

“Kalau bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan pedagang kaki lima, dengan membentuk ketua organisasi berdasarkan jenis barang dagangannya sehingga lebih mudah untuk mengatur dan pengelolaan pedagang kaki lima dapat berjalan dengan baik.”

Kepala Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, Ibu Linda. (Wawancara : Jum'at, 2 Agustus 2022, Pukul 10:30 WIB). Menambahkan :

“Dengan membentuk ketua organisasi berdasarkan jenis dagangannya agar lebih mudah untuk diatur sehingga pengunjung pun tidak kebingungan mencari apa yang dicari, langkah ini bisa menjadi efektif dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar tuah serumpun.”

Diketahui dari hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau bentuk pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima sudah baik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Melaksanakan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan persentase 55% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi dan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya.

3. Mengarahkan

Mengarahkan adalah fungsi kepemimpinan, komunikasi dan koordinasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 72 orang terhadap indikator melakukan koordinasi dengan pengurus pasar dan mengendalikan situasi pasar.

Tabel 5.9 :
Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Tentang
Indikator Mengarahkan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata
Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Melakukan koordinasi dengan pengurus pasar | 43 (60%) | 18 (25%) | 11 (15%) | 72 (100%) |
| 2. | Mengendalikan situasi pasar | 33 (46%) | 23 (32%) | 16 (22%) | 72 (100%) |
| Jumlah | | 76 | 41 | 27 | 144 |
| Rata-rata | | 38 | 20.5 | 13.5 | 72 |
| Persentase | | 53% | 28% | 19% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 33-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : *Olahan Kuesioner Penelitian, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pedagang kaki lima paling tinggi berada di persentase 53% dengan kriteria Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala pengukuran 67-100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari mengarahkan adalah 53% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada melakukan koordinasi dengan pengurus pasar adalah 60%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima di koordinasikan dengan ketua masing-masing. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 25% dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 15%. Hal ini

dikarenakan koordinasi jarang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan melakukan koordinasi dengan pengurus pasar belum maksimal.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian kedua yang menjawab Baik pada mengendalikan situasi pasar adalah 46%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat berjualan akan diarahkan ke tempat yang tersedia seperti kios dan los. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 32% dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 22%. Hal ini dikarenakan masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan. Hal tersebut menunjukkan mengendalikan situasi pasar belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Ibu Ismawarni. Mengenai indikator Mengarahkan dengan pertanyaan bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun? (*Wawancara : Kamis, 1 Agustus 2022, Pukul 10:51 WIB*). Beliau menjawab :

“Kalau bentuk pengarahan, menurut saya sudah cukup baik dengan adanya ketua organisasi membuat pedagang kaki lima mudah untuk diarahkan dan juga dapat dikendalikan dengan baik. Dengan begitu tidak ada hambatan dan membuat pengelolaan pedagang kami lima selama ini aman aman saja.”

Kepala Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, Ibu Linda. (Wawancara : Jum'at, 2 Agustus 2022, Pukul 10:30 WIB). Menambahkan :

“Pengarahan yang diberikan paling hanya memberi pengarahan kepada ketua organisasi masing masing, dengan begitu situasi pasar juga bisa kami kendalikan dengan baik, selama ini pengelolaan pedagang kaki lima aman aman saja tidak ada hambatan.”

Diketahui dari hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau pengarahan yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima sudah baik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Mengarahkan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan persentase 53% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan koordinasi jarang dilakukan dan masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan Dinas memastikan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima sesuai rencana kerja. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 72 orang terhadap indikator pengawasan terhadap pedagang kaki lima pengawasan yang terdapat dua item penilaian yaitu mengawasi pedagang kaki lima dan mengevaluasi program kerja.

Tabel 5.10 :
Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Tentang
Indikator Pengawasan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola
Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Mengawasi pedagang kaki lima | 34 (47%) | 28 (39%) | 10 (14%) | 72 (100%) |
| 2. | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima | 36 (50%) | 20 (28%) | 16 (22%) | 72 (100%) |
| Jumlah | | 70 | 48 | 26 | 144 |
| Rata-rata | | 35 | 24 | 13 | 72 |
| Persentase | | 49% | 33% | 18% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 33-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pedagang kaki lima paling tinggi berada di persentase 49% dengan kriteria Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala pengukuran 67-100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari mengarahkan adalah 49% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada mengawasi pedagang kaki lima adalah 47%. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya dari pihak Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau tidak ada dari pihak lain. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 39% dan tanggapan responden pedagang kaki

lima yang menjawab kurang baik 14%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi. Hal ini menunjukkan mengawasi pedagang kaki lima cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pedagang kaki lima pada item penilaian kedua yang menjawab baik pada melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima adalah 50%. Hal ini dikarenakan tindakan evaluasi dalam bentuk keamanan yang dilakukan dengan langsung turun lapangan. Sedangkan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 28% dan tanggapan responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 22%. Hal ini dikarenakan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar terganggu. Hal ini menunjukkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Ibu Ismawarni. Mengenai indikator Pengawasan dengan pertanyaan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun? (*Wawancara : Kamis, 1 Agustus 2022, Pukul 10:51 WIB*). Beliau menjawab :

“Kalo dari dinas kami melakukan pengawasan dalam pengelolaan pedagang kaki lima setiap satu bulan sekali, kami mendatangi pasar buah serumpun untuk melihat sejauh mana pedagang kaki lima di pasar buah serumpun itu di kelola oleh Korwil Pasar Wilayah III”.

Kepala Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau, Ibu Linda. (Wawancara : Jum'at, 2 Agustus 2022, Pukul 10:30 WIB). Menambahkan :

“Kami telah memberikan pengawasan dengan langsung turun ke lapangan untuk melihat aktivitas pedagang kaki lima setiap pagi dan setiap hari untuk memastikan pengelolaan pedagang kaki lima berjalan dengan baik atau tidak”.

Diketahui dari hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan pedagang kaki lima sudah baik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Pengawasan berada pada kategori penilaian **“Cukup Baik”** dengan persentase 49% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi dan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar terganggu.

Berdasarkan tanggapan responden pedagang kaki lima, hasil dari empat indikator yaitu Merencanakan, Melaksanakan, Mengarahkan, dan Pengawasan angka tertinggi adalah indikator Merencanakan dengan persentase 64% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria penilaian **“Cukup Baik”**.

5.2.2 Responden Pengunjung

1. Merencanakan

Merencanakan adalah sebagai proses penetapan tujuan dan keputusan pengelolaan pedagang kaki lima. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 100 orang terhadap indikator merencanakan yang terdapat dua item penilaian yaitu menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima.

Tabel 5.11 :
Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung Tentang Indikator Merencanakan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana | 42 (42%) | 34 (34%) | 24 (24%) | 100 (100%) |
| 2. | Membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima | 50 (50%) | 30 (30%) | 20 (20%) | 100 (100%) |
| Jumlah | | 92 | 64 | 44 | 200 |
| Rata-rata | | 46 | 32 | 22 | 100 |
| Persentase | | 46% | 32% | 22% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pengunjung paling tinggi berada di persentase 46% dengan kriteria Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala 67-

100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari merencanakan adalah 46% yang berada pada skala 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana adalah 42%. Hal ini dikarenakan rencana dari segi fasilitas seperti kios dan los, tempat parkir, tempat penampungan sampah, daya tampung listrik, dan mesjid sudah tersedia. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 34% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 24%. Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat pengunjung kesulitan dalam berbelanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyusun rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana sudah cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian kedua yang menjawab baik pada membuat rencana pembinaan pedagang kaki lima adalah 50%. Hal ini dikarenakan rencana pembinaan yaitu melakukan sosialisasi. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 30% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 20%. Hal ini dikarenakan pengunjung belum melihat sosialisasi yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rencana pembinaan pedagang kaki lima belum maksimal.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Merencanakan berada pada kategori penilaian

“Cukup Baik” dengan persentase 46% pada skala 34-66%. Hal ini dikarenakan Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat pengunjung kesulitan dalam berbelanja dan pengunjung belum melihat sosialisasi yang dilakukan.

2. Melaksanakan

Melaksanakan adalah kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengorganisasikan dan menggerakkan program dan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 100 orang terhadap indikator melaksanakan yang terdapat dua item penilaian yaitu menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar dan mengatur tata letak pedagang kaki lima.

Tabel 5.12 :
Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung Tentang Indikator Melaksanakan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar | 56 (56%) | 32 (32%) | 12 (12%) | 100 (100%) |
| 2. | Mengatur tata letak pedagang kaki lima | 44 (44%) | 31 (31%) | 25 (25%) | 100 (100%) |
| Jumlah | | 100 | 63 | 37 | 200 |
| Rata-rata | | 50 | 31.5 | 18.5 | 100 |
| Persentase | | 50% | 32% | 18% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 33-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pengunjung paling tinggi berada di persentase 50% dengan kriteria Baik setelah

dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala 67-100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari merencanakan adalah 50% yang berada pada skala 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar adalah 56%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima membentuk ketua organisasi berdasarkan jenis barang dagangan. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 32% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 12%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa menyusun struktur organisasi kepengurusan pasar belum efektif.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian kedua yang menjawab baik pada mengatur tata letak pedagang kaki lima adalah 44%. Hal ini dikarenakan pengunjung senang pedagang kaki lima ditata sesuai dengan jenis dagangannya. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 31%. dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 25%. Hal ini dikarenakan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya. Hal tersebut menunjukkan melaksanakan penertiban pedagang kaki lima belum maksimal.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Melaksanakan berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan persentase 50% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi dan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya.

3. Mengarahkan

Mengarahkan adalah fungsi kepemimpinan, komunikasi dan koordinasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 100 orang terhadap indikator mengarahkan yang terdapat dua item penilaian yaitu melakukan koordinasi dengan pengurus pasar dan mengendalikan situasi pasar.

Tabel 5.13 :
Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung Tentang Indikator Mengarahkan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Melakukan koordinasi dengan pengurus pasar | 49 (49%) | 29 (29%) | 12 (12%) | 100 (100%) |
| 2. | Mengendalikan situasi pasar | 40 (40%) | 36 (36%) | 24 (24%) | 100 (100%) |
| Jumlah | | 99 | 65 | 36 | 200 |
| Rata-rata | | 49.5 | 32.5 | 18 | 100 |
| Persentase | | 50% | 32% | 18% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 33-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pengunjung paling tinggi berada di persentase 50% dengan kriteria Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria baik dengan skala 67-100%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari mengarahkan adalah 50% yang berada pada skala 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada melakukan koordinasi dengan pengurus pasar adalah 49%. Hal ini dikarenakan pengunjung melihat adanya pedagang kaki lima di koordinasikan dengan ketua masing-masing. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 29% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 12%. Hal ini dikarenakan pengunjung melihat koordinasi jarang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan melakukan koordinasi dengan pengurus pasar belum maksimal.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian kedua yang menjawab Baik pada mengendalikan situasi pasar adalah 40%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat berjualan akan diarahkan ke tempat yang tersedia seperti kios dan los. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 36% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 24%. Hal ini dikarenakan pengunjung melihat masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan. Hal tersebut menunjukkan mengendalikan situasi pasar belum maksimal.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Mengarahkan berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan persentase 50% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan pengunjung melihat koordinasi jarang dilakukan dan pengunjung melihat masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan Dinas memastikan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima sesuai rencana kerja. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 100 orang terhadap indikator pengawasan terhadap pedagang kaki lima mengarahkan yang terdapat dua item penilaian yaitu mengawasi pedagang kaki lima dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima.

Tabel 5.14 :
Distribusi Tanggapan Responden Pengunjung Tentang Indikator Pengawasan Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Item Penilaian | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1. | Mengawasi pedagang kaki lima | 53 (53%) | 31 (31%) | 16 (16%) | 100 (100%) |
| 2. | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima | 51 (51%) | 29 (29%) | 20 (20%) | 100 (100%) |
| Jumlah | | 104 | 60 | 36 | 200 |
| Rata-rata | | 52 | 30 | 18 | 100 |
| Persentase | | 52% | 30% | 18% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pengunjung paling tinggi berada di persentase 58% dengan kriteria Kurang Baik setelah dimasukkan ke skala pengukuran tidak mencukupi kriteria kurang baik dengan skala 1-33%. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dari pengawasan adalah 58% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian pertama yang menjawab Baik pada mengawasi pedagang kaki lima adalah 53%. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya dari pihak Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau tidak ada dari pihak lain. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 31% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 16%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi. Hal ini menunjukkan mengawasi pedagang kaki lima cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan pengunjung pada item penilaian kedua yang menjawab baik pada melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima adalah 51%. Hal ini dikarenakan tindakan evaluasi dalam bentuk keamanan yang dilakukan dengan langsung turun lapangan. Sedangkan tanggapan responden pengunjung yang menjawab cukup baik 29% dan tanggapan responden pengunjung yang menjawab kurang baik 20%. Hal ini dikarenakan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar

terganggu. Hal ini menunjukkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima belum maksimal.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Pengawasan berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan persentase 58% pada skala pengukuran 34-66%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi dan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar terganggu.

Berdasarkan tanggapan responden pengunjung, hasil dari empat indikator yaitu Merencanakan, Melaksanakan, Mengarahkan, dan Pengawasan angka tertinggi adalah indikator Pengawasan dengan persentase 52% yang berada pada skala pengukuran 34-66% dengan kriteria penilaian “Cukup Baik”.

Tabel 5.15 :
Rekapan Hasil Tanggapan Semua Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Indikator | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | B | CB | KB | |
| 1. | Merencanakan | 93 (64%) | 34 (24%) | 17 (12%) | 144 (100%) |
| 2. | Melaksanakan | 79 (55%) | 43 (30%) | 22 (15%) | 144 (100%) |
| 3. | Mengarahkan | 76 (53%) | 41 (28%) | 27 (19%) | 144 (100%) |
| 4. | Pengawasan | 70 (49%) | 48 (33%) | 26 (18%) | 144 (100%) |
| Jumlah | | 318 | 166 | 92 | 576 |
| Rata-rata | | 79.5 | 41,5 | 23 | 58.5 |
| Persentase | | 55% | 29% | 16% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pedagang kaki lima pada indikator merencanakan yang menjawab baik adalah 64%. Hal ini dikarenakan rencana meningkatkan sarana dan pasarana sudah tersedia. Sedangkan tanggapan semua responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 24% dan tanggapan semua responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 12%. Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat kesulitan dalam berjualan maupun berjualan dan masih belum terlihat sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pedagang kaki lima pada indikator melaksanakan yang menjawab baik adalah 55%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 30% dan tanggapan semua responden pedagang kaki lima yang menjawab kurang baik 15%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi dan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pedagang kaki lima pada indikator mengarahkan yang menjawab baik adalah 53%. Hal ini dikarenakan pengarahannya pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 28% dan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik 19%. Hal ini dikarenakan koordinasi jarang dilakukan dan masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pedagang kaki lima pada indikator pengawasan yang menjawab baik adalah 49%. Hal ini dikarenakan pengawasan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden pedagang kaki lima yang menjawab cukup baik 33% dan tanggapan semua responden pedgang kaki lima yang menjawab kurang baik 18%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi dan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar terganggu.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa tanggapan semua responden pedagang kaki lima terhadap indikator tersebut berada pada katerogi penilaian “**Cukup Baik**” dengan persentase 55%.

Tabel 5.16 :
Rekapan Hasil Tanggapan Semua Responden Pengunjung Terhadap Penelitian Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Indikator | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | B | CB | KB | |
| 1. | Merencanakan | 92 (46%) | 64 (32%) | 44 (22%) | 200 (100%) |
| 2. | Melaksanakan | 100 (50%) | 63 (31%) | 37 (19%) | 200 (100%) |
| 3. | Mengarahkan | 99 (49%) | 65 (33%) | 36 (18%) | 200 (100%) |
| 4. | Pengawasan | 104 (52%) | 60 (30%) | 36 (18%) | 200 (100%) |
| Jumlah | | 395 | 252 | 153 | 800 |
| Rata-rata | | 98.75 | 63 | 38.25 | 200 |
| Persentase | | 49% | 32% | 29% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : Olahan Kuesioner Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pengunjung pada indikator merencanakan yang menjawab baik adalah 46%. Hal ini dikarenakan rencana meningkatkan sarana dan pasarana sudah tersedia. Sedangkan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab cukup baik 32% dan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab kurang baik 22%. Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat kesulitan dalam berjualan maupun berjualan dan masih belum terlihat sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pengunjung pada indikator melaksanakan yang menjawab baik adalah 50%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab cukup baik

31% dan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab kurang baik 19%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi dan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pengunjung pada indikator mengarahkan yang menjawab baik adalah 49%. Hal ini dikarenakan pengarahan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab cukup baik 33% dan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab kurang baik 18%. Hal ini dikarenakan koordinasi jarang dilakukan dan masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pengunjung pada indikator pengawasan yang menjawab baik adalah 52%. Hal ini dikarenakan pengawasan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab cukup baik 30% dan tanggapan semua responden pengunjung yang menjawab kurang baik 18%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi dan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar terganggu.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa tanggapan semua responden pengunjung terhadap indikator tersebut berada pada katerogi penilaian **“Cukup Baik”** dengan persentase 49%.

Tabel 5.17 :
Rekapan Hasil Tanggapan Semua Responden Terhadap Penelitian
Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

| No | Indikator | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | B | CB | KB | |
| 1. | Merencanakan | 185 (54%) | 98 (28%) | 61 (18%) | 344 (100%) |
| 2. | Melaksanakan | 179 (52%) | 106 (31%) | 59 (17%) | 344 (100%) |
| 3. | Mengarahkan | 175 (51%) | 106 (31%) | 63 (18%) | 344 (100%) |
| 4. | Pengawasan | 174 (51%) | 108 (31%) | 62 (18%) | 344 (100%) |
| Jumlah | | 713 | 418 | 245 | 1376 |
| Rata-rata | | 178.25 | 104.5 | 61.25 | 344 |
| Persentase | | 52% | 30% | 18% | 100% |
| Skala Pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup Baik | | | |

Sumber : *Olahan Kuesioner Penelitian, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pada indikator merencanakan yang menjawab baik adalah 54%. Hal ini dikarenakan rencana meningkatkan sarana dan pasarana sudah tersedia. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik 28% dan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik 18%. Hal ini dikarenakan ruang jalan yang sempit membuat kesulitan dalam berjualan maupun berjualan dan masih belum terlihat sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pada indikator melaksanakan yang menjawab baik adalah 52%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik 31% dan tanggapan

semua responden yang menjawab kurang baik 17%. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi dan masih terdapat penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pada indikator mengarahkan yang menjawab baik adalah 51%. Hal ini dikarenakan pengarahan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik 31% dan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik 18%. Hal ini dikarenakan koordinasi jarang dilakukan dan masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan semua responden pada indikator pengawasan yang menjawab baik adalah 51%. Hal ini dikarenakan pengawasan pengelolaan pedagang kaki lima sudah dilakukan. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik 31% dan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik 18%. Hal ini dikarenakan barang yang dijual pedagang kaki lima tidak diawasi dan kurang menegur orang yang membuat keamanan pasar terganggu.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa tanggapan semua responden terhadap indikator tersebut berada pada katerogi penilaian **“Cukup Baik”** dengan persentase 52%.

5.3 Faktor penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun), yaitu sebagai berikut :

1. Ruang jalan yang sempit membuat pedagang kaki lima sulit untuk berjualan tidak hanya pedagang kaki lima, pengunjung juga sulit untuk berbelanja dan berdesakan.
2. Tidak ada yang ingin menjadi ketua organisasi membuat pedagang kaki lima diarahkan satu persatu
3. Banyak sampah yang berserakan membuat pedagang kaki lima yang berjualan maupun pengunjung yang berbelanja merasa kurang nyaman.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun) banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuesioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Merencanakan, Melaksanakan, Mengarahkan, dan Pengawasan. Maka dari itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk indikator Merencanakan berada pada kategori “Cukup Baik”, karena perencanaan dari segi fasilitas belum maksimal, yaitu ruang jalan yang sempit membuat kesulitan dalam berjualan maupun berbelanja.
2. Untuk indikator Melaksanakan berada pada kategori “Cukup Baik”, karena pelaksanaan dengan membentuk organisasi kepengurusan pasar belum efektif, yaitu pedagang kaki lima ada yang tidak memiliki ketua organisasi.
3. Untuk indikator Mengarahkan berada pada kategori “Cukup Baik”, karena pengarahan belum maksimal, yaitu terdapat pedagang kaki lima yang tidak diarahkan.

4. Untuk indikator Pengawasan berada pada kategori “Cukup Baik”, karena pengawasannya hanya dari Koordinator Wilayah Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang dan Sei Mandau.
5. Faktor penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun), adalah sebagai berikut :
 - 1) Ruang jalan yang sempit membuat pedagang kaki lima sulit untuk berjualan tidak hanya pedagang kaki lima, pengunjung juga sulit untuk berbelanja dan berdesakan.
 - 2) Tidak ada yang ingin menjadi ketua organisasi membuat pedagang kaki lima diarahkan satu persatu.
 - 3) Banyak sampah yang berserakan membuat pedagang kaki lima yang berjualan maupun pengunjung yang berbelanja merasa kurang nyaman.

6.2 Saran

1. Sebaiknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak meningkatkan sarana dan prasarana di pasar buah serumpun, sehingga para pedagang tidak berjualan di badan jalan.
2. Sebaiknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak lebih memperhatikan pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat sehingga tidak ada kios dan los yang tidak ditempati pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kabiru, Said. 2017. *Manajemen dan Teori Aplikasi*. Bandung. Alfabet.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=K7IDS pQAAAAJ&citation_for_view=K7IDS pQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
- Andry, Hendry dan A. Tarmizi Yussa. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=Hendry+dan+tarmizi+perilaku+dan+etika+administrasi+publik+&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qabs&t=1653890814296&u=%23p%3DhwUPRJySknQJ
- Azhari, Dian. 2017. Penataan Pedagang Kaki Lima pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. *Jurnal FISIP*, Vol. 4 No. 1, Februari.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12270>
- Eka Evita, Bambang Supriyono, dan Imam Hanafi. Implementasi Kebijakan Penataa Pedagang Kaki Lima (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 5.
<https://www.neliti.com/id/publications/74977/implementasi-kebijakan-penataan-pedagang-kaki-lima-studi-pada-batu-tourism-cente>
- Erwita dan Raja Sarah Patricia. 2014. Dampak Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kinerja Usaha (Studi pada PKL Wilayah Sekitar Kampus di Kota Jambi). *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 1, Januari - Maret.
<https://online-journal.unja.ac.id/jmbp/article/view/2128/7619>
- Hamim, Sufian dan Adnan, Indra Muchlis. 2013. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen: Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Trussmedia Grafika.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sufian+hamim+administrasi%2C+organisasi%2C+dan+manajemen&btnG=#d=gs_qabs&t=1653890298447&u=%23p%3DLy3EiOKFABIJ
- Hamim, Sufian dan Adnan, Indra Muchlis. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Edisi Revisi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Trussmedia Grafika.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sufian+administrasi%2C+organisasi+dan+manajemen+&btnG=#d=gs_qabs&t=1653890629298&u=%23p%3D3zuTcq7rom0J
- Hamim, Sufian dan Adnan, Indra Muchlis. 2016. *Manajemen Strategis dalam Pembangunan*. Edisi Revisi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Trussmedia Grafika.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=manajemen+strategis+pembangunan+sufian&btnG=#d=gs_qabs&t=1663086128336&u=%23p%3DEpt0cN_8CpIJ

Hari Indrawan, Achmad Hidir, dan Harapan Tua R.F.S. 2020. Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 4, Januari.

<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/search/authors/view?firstName=Hari%20Indrawan%2C&middleName=Achmad%20Hidir%2C&lastName=Harapan%20Tua%20R.F.S&affiliation=&country=>

Hasanuddin. 2019. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, Vol. 15 No. 1, Mei.

<http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiam/article/download/543/245>

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. GAVA MEDIA.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=18362607087458713024#d=gs_qabs&t=1654102922000&u=%23p%3DwPOLVtsV1f4J

Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administasi Publik*. Depok. Rajawali Pers.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=beddy+Maksudi+dasar+dasar+administrasi+publik+&btnG=#d=gs_qabs&t=1653914122412&u=%23p%3DpW1L27WX6PAJ

Muhammad Yunus dan Auliya Insani. 2017. Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari). *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, Juni.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/4064>

Mulyadi, Lalu. 2010. Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Vol. VIII No. 15, Januari.

<http://eprints.itn.ac.id/3541/>

Puspitasari, Dinarjati Eka. 2010. Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Vol. 22 No. 3, Oktober.

<https://www.neliti.com/id/publications/40679/penataan-pedagang-kaki-lima-kuliner-untuk-mewujudkan-fungsi-tata-ruang-kota-di-k>

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT. Alfabet.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sugiyono+metode+penelitian+kuantitatif+dan+kualitatif+&btnG=#d=gs_qabs&t=1654102752343&u=%23p%3D3zSTQnaNSjMJ

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syafri+Wirman+studi+tentang+administrasi+publik&btnG=#d=gs_qabs&t=1653890722821&u=%23p%3DkAly_EwT5MAJ

T. Kristian Budi. 2016. Penataan Pedagang Kaki Lima di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 10 No. 2, Desember.
<http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/37>

Tona Lubis, Erwita, Andi, dan Raja. 2014. Model Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 2, April - Juni.
<https://online-journal.unja.ac.id/jmbp/article/view/2134/7625>

